

Kumba Digdowiseiso, S.E., M.App.Ec

TEORI PEMBANGUNAN



Perpustakaan Nasional RI : *Katalog Dalam terbitan (KDT)*

Copyright : **Kumba Digdowiseiso, S.E., M.App.Ec**

Teori Pembangunan

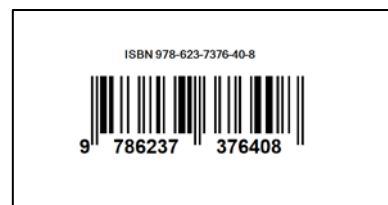
ISBN : 978-623-7376-40-8

Desain Sampul dan Ilustrasi : **Kumba Digdowiseiso, SE., M.App.Ec**
Editor : **Prof. Dr. Eko Sugiyanto, M.Si**

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

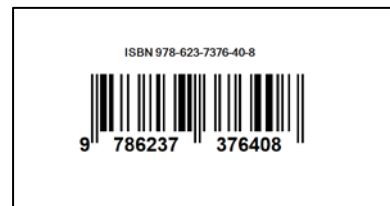
Penerbit : Lembaga Penerbitan Universitas Nasional (LPU-UNAS)
Jl. Sawo Manila No. 61, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520
Telp : 021-78837310 / 7806700 (Hunting) ext. 172
Fax : 021-7802718
Email : bee_bers@yahoo.com

Cetakan Pertama, Juli 2019



Tentang Penulis

Kumba Digdowiseiso, S.E., M.App.Ec lahir di Jakarta, 28 Mei 1985, Istri bernama Dewi Udhany, S.Sos., anak bernama Kinza Edelmar Titoadigny (Kenny) dan Zerina Elinor Titoadigny (Jenna). Saat ini merupakan Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nasional. Pendidikan Sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, dan Pendidikan Sarjana Strata Dua (S2) diperoleh dari University of Adelaide – Australia. Aktif dalam menulis buku dan jurnal internasional bereputasi.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, berkat rahmat dan karunia Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan penyusunan buku yang berjudul Teori Pembangunan. Buku ini merupakan hasil telusur dari berbagai literatur yang terkait dengan bidang administrasi publik dan bisnis. Semoga materi buku ini dapat dimanfaatkan sebagai penambah referensi kajian dalam bidang Administrasi Publik dan Bisnis dengan tujuan untuk membantu para mahasiswa yang sedang mempersiapkan atau sedang melaksanakan penelitian dalam rangka menyelesaikan tugas akhir, baik berupa skripsi, tesis, maupun disertasi dan digunakan sebagai referensi bagi dosen dan peneliti profesional yang sering terlibat dalam kegiatan penelitian, baik di perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat maupun di instansi pemerintah atau swasta.

Sistematika penulisan buku ini telah diupayakan sejalan dengan langkah-langkah sistematis metode ilmiah, dengan harapan pembaca akan lebih mudah memahami secara konseptual metodologi penelitian sehingga mampu menerapkannya ke dalam penelitian yang sesungguhnya.

Dengan segala hormat dan kerendahan hati, penulis dengan senang hati dan terbuka menerima kritik dan saran konstruktif dari para pembaca yang ditujukan pada pencapaian kesempurnaan atas kualitas buku ini.

Jakarta, Juli 2019

Penulis,

Kumba Digdowiseiso, S.E, M.App.Ec

KATA PENGANTAR

Dengan rahmat dan karunia-Nya telah terbit buku yang ditulis oleh Saudara Kumba Digdowiseiso, S.E., M.App.Ec tentang Teori Pembangunan. Kita sambut baik buku ini sebagai suatu pemikiran yang konstruktif dalam pengembangan administrasi publik dan bisnis maupun ilmu sosial. Hal ini memberikan kemudahan bagi kita untuk mengetahui dan memahami secara konseptual Teori Pembangunan.

Kita semua yakin bahwa dengan diterbitkannya buku ini sangat luas manfaatnya bagi kalangan profesional, akademisi dan bagi mahasiswa khususnya yang ingin mengembangkan tentang penerapan Teori Pembangunan.

Akhir kata Lembaga Penerbitan Universitas-Universitas Nasional (LPU-UNAS) mengapresiasi terbitnya buku ini, semoga bermanfaat dan berguna bagi kita semua.

LPU-UNAS

Harun Umar

DAFTAR ISI

	Halaman
Bab I	Konsep, Ruang Lingkup, dan Paradigma Teori Pembangunan
A. Latar Belakang	1
B. Ruang Lingkup Pembangunan	3
C. Konsep Pembangunan	9
D. Paradigma Pembangunan	14
Bab II	Historikal Teori Pembangunan
A. Perkembangan Teori Pembangunan Sebelum Kemerdekaan	18
B. Perkembangan Teori Pembangunan Setelah Kemerdekaan	23
C. Teori Dependensi (Ketergantungan)	27
D. Enam Bagian Pokok Dari Teori Independensi	34
E. Dasar Teori Sistem Dunia	36
Bab III	Perubahan Sosial Dan Pembangunan
A. Definisi	40
B. Perubahan Sosial Dalam Perspektif Karl Marx	42
C. Lima Tahap Pertumbuhan Ekonomi: W.W. Rostow	44
Bab IV	Peran Negara Dan Masyarakat Dalam Pembangunan
A. Definisi	54
B. Pembangunan di Dunia Ketiga	55

	C. Peran Negara/Pemerintah Dalam Pembangunan	57
	D. Peran Masyarakat Sebagai Pelaku Pembangunan	59
Bab V	Teori Fungsional Struktural	
	A. Perkembangan Teori Fungsional Struktural	62
	B. Paradigma AGIL (<i>Talcot Parsons</i>)	74
	C. Teori Fungsional Struktural Dalam Kehidupan Sosial	76
Bab VI	Teori Ketergantungan	
	A. Definisi	78
	B. Sejarah Teori Ketergantungan	78
	C. Kritik Terhadap Teori Ketergantungan	88
Bab VII	Teori Pasca Ketergantungan	
	A. Teori Sistem Dunia	91
	B. Teori Liberal	93
	C. Teori Artikulasi	95
	Daftar Pustaka	98

BAB I

KONSEP, RUANG LINGKUP, DAN PARADIGMA TEORI PEMBANGUNAN

A. Latar Belakang

Menurut beberapa pakar, teori-teori pembangunan dapat dikelompokkan ke dalam dua paradigma, yaitu Modernisasi dan Ketergantungan (Lewellen 1995; Larrain 1994; Kiely 1995). Di dalam paradigma Modernisasi termasuk teori-teori makro tentang pertumbuhan ekonomi dan perubahan sosial, dan mikro tentang nilai-nilai individu yang menunjang proses perubahan tersebut. Sedangkan paradigma Ketergantungan mencakup teori-teori Keterbelakangan (*Underdevelopment*), Ketergantungan (*Dependent Development*), dan Sistem Dunia (*World System Theory*) sesuai dengan klasifikasi Larrain (1994).

Berbeda dengan pengelompokan di atas, yang membagi teori pembangunan ke dalam dua paradigma, buku ini mengelompokkan ke dalam tiga paradigma atau perspektif, yaitu Modernisasi, Keterbelakangan dan Ketergantungan. Dalam hal ini, tidak ada perbedaan dalam perspektif Modernisasi. Di dalam Paradigma Keterbelakangan termasuk Teori *Underdevelopment* Baran, Frank, Amin, dan Wallerstein (*World System Theory*), karena mereka lebih mencurahkan perhatian kepada pengaruh

ekonomi global terhadap keterbelakangan di Dunia Ketiga. Sedangkan *Associated Dependent Development* (Cardoso dan Faletto) dan *Dependent Development* (Evans) dimasukkan ke dalam Paradigma Ketergantungan, karena kedua teori ini lebih memberikan perhatian kepada kemungkinan pertumbuhan ekonomi di negara-negara yang sedang membangun, walaupun ada ketergantungan terhadap ekonomi global.

Buku ini disusun untuk menjelaskan teori-teori pembangunan sebagaimana klasifikasi di atas, dengan melakukan sedikit analisis tentang perkembangannya melalui hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan oleh para ahli. Sebelum sampai kepada diskusi tentang berbagai teori dan paradigma pembangunan sebagaimana disebutkan di atas, pada bagian awal akan dibahas latar belakang kemunculan teori dan paradigma tersebut, berdasarkan pengalaman Eropa. Pembicaraan tentang sejarah ini terpusat kepada hubungan antara proses perkembangan masyarakat Eropa (sejak feodalisme sampai kapitalisme dan imperialisme) dengan kemunculan beberapa teori ekonomi, perubahan sosial dan pembangunan. Secara khusus, bagian ini terbagi menjadi dua periode, yaitu sejarah sebelum dan setelah 1945.

Pada bagian berikutnya, dibicarakan pandangan Karl Marx dan Rostow berkenaan dengan teori perubahan dan

pertumbuhan bertahap. Kedua pakar ini perlu dibicarakan secara khusus, karena kontribusinya yang cukup besar terhadap pemikiran tentang perubahan sosial dan pembangunan. Dalam hal ini, Marx mewakili dasar-dasar pandangan klasik sedangkan Rostow dianggap mewakili pandangan modern. Kemudian dilanjutkan dengan teori Modernisasi, yang disusul dengan kritik terhadap teori ini. Selanjutnya, diskusi diarahkan kepada kemunculan teori Keterbelakangan dan Ketergantungan sebagai reaksi terhadap berbagai kelemahan teori Modernisasi. Hal ini dilakukan untuk melihat pasang-surut teori-teori pembangunan, sejak kelahiran teori Modernisasi awal Tahun 1950an, sampai kemunculan teori Ketergantungan dan *New Comparative Political Economy (NCPE)* awal 1980an. Secara ringkas, kritik yang tajam terhadap kegagalan teori Modernisasi tidak seluruhnya benar, hal ini dapat dibuktikan secara empiris dalam bagian selanjutnya. Apabila dipahami dengan seksama, pandangan NCPE sesungguhnya merupakan kebangkitan dari teori Modernisasi yang telah dianggap gagal di Amerika Latin, dimana teori ini seolah-olah telah banyak melakukan penyesuaian sepanjang waktu.

B. Ruang Lingkup Pembangunan

Pembangunan mempunyai pengertian dinamis, maka tidak boleh dilihat dari konsep yang statis. Pembangunan juga mengandung

orientasi dan kegiatan yang tanpa akhir. Proses pembangunan merupakan suatu perubahan sosial budaya. Pembangunan menunjukkan terjadinya suatu proses maju berdasarkan kekuatan sendiri, tergantung kepada manusia dan struktur sosialnya. Pembangunan tidak bersifat *top-down*, tetapi tergantung dengan “innerwill”, proses emansipasi diri. Dengan demikian, partisipasi aktif dan kreatif dalam proses pembangunan hanya mungkin bila terjadi karena proses pendewasaan.

Kecenderungan globalisasi dan regionalisasi membawa sekaligus tantangan dan peluang baru bagi proses pembangunan di Indonesia. Dalam era seperti ini, kondisi persaingan antar pelaku ekonomi (badan usaha dan/atau negara) akan semakin tajam. Dalam kondisi persaingan yang sangat tajam ini, tiap pelaku ekonomi (tanpa kecuali) dituntut menerapkan dan mengimplementasikan secara efisien dan efektif strategi bersaing yang tepat (Kuncoro, 2004). Dalam konteks ini diperlukan ”strategi berperang” modern untuk memenangkan persaingan dalam lingkungan hiperkompetitif diperlukan tiga hal (D’Aveni, 1995), *Pertama*, visi terhadap perubahan dan gangguan. *Kedua*, kapabilitas, dengan mempertahankan dan mengembangkan kapasitas yang fleksibel dan cepat merespon setiap perubahan. *Ketiga*, taktik yang mempengaruhi arah dan gerakan pesaing.

Teori pembangunan dalam ilmu sosial dapat dibagi ke dalam dua paradigma besar, modernisasi dan ketergantungan (Lewwellen 1995, Larrin 1994, Kiely 1995 dalam Tikson, 2005). Paradigma modernisasi mencakup teori-teori makro tentang pertumbuhan ekonomi dan perubahan sosial dan teori-teori mikro tentang nilai-nilai individu yang menunjang proses perubahan. Paradigma ketergantungan mencakup teori-teori keterbelakangan (*under-development*) ketergantungan (*dependent development*) dan sistem dunia (*world system theory*) sesuai dengan klasifikasi Larrain (1994). Sedangkan Tikson (2005) membaginya ke dalam tiga klasifikasi teori pembangunan, yaitu modernisasi, keterbelakangan dan ketergantungan. Dari berbagai paradigma tersebut itulah kemudian muncul berbagai versi tentang pengertian pembangunan.

Pengertian pembangunan mungkin menjadi hal yang paling menarik untuk diperdebatkan. Mungkin saja tidak ada satu disiplin ilmu yang paling tepat mengartikan kata pembangunan. Sejauh ini serangkaian pemikiran tentang pembangunan telah berkembang, mulai dari perspektif sosiologi klasik (Durkheim, Weber, dan Marx), pandangan Marxis, modernisasi oleh Rostow, strukturalisme bersama modernisasi memperkaya ulasan pendahuluan pembangunan sosial, hingga pembangunan berkelanjutan. Namun, ada tema-tema pokok

yang menjadi pesan di dalamnya. Dalam hal ini, pembangunan dapat diartikan sebagai suatu upaya terkoordinasi untuk menciptakan alternatif yang lebih banyak secara sah kepada setiap warga negara untuk memenuhi dan mencapai aspirasinya yang paling manusiawi (Nugroho dan Rochmin Dahuri, 2004). Tema pertama adalah koordinasi, yang berimplikasi pada perlunya suatu kegiatan perencanaan seperti yang telah dibahas sebelumnya. Tema kedua adalah terciptanya alternatif yang lebih banyak secara sah. Hal ini dapat diartikan bahwa pembangunan hendaknya berorientasi kepada keberagaman dalam seluruh aspek kehidupan. Ada pun mekanismenya menuntut kepada terciptanya kelembagaan dan hukum yang terpercaya yang mampu berperan secara efisien, transparan, dan adil. Tema ketiga mencapai aspirasi yang paling manusiawi, yang berarti pembangunan harus berorientasi kepada pemecahan masalah dan pembinaan nilai-nilai moral dan etika umat.

Mengenai pengertian pembangunan, para ahli memberikan definisi yang bermacam-macam seperti halnya perencanaan. Istilah pembangunan bisa saja diartikan berbeda oleh satu orang dengan orang lain, daerah yang satu dengan daerah lainnya, Negara satu dengan Negara lain. Namun secara umum ada suatu kesepakatan bahwa pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan (Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah, 2005).

Siagian (1994) memberikan pengertian tentang pembangunan sebagai “Suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*)”. Sedangkan Ginanjar Kartasasmita (1994) memberikan pengertian yang lebih sederhana, yaitu sebagai “suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana.”

Pada awal pemikiran tentang pembangunan sering ditemukan adanya pemikiran yang mengidentikan pembangunan dengan perkembangan, pembangunan dengan modernisasi dan industrialisasi, bahkan pembangunan dengan westernisasi. Seluruh pemikiran tersebut didasarkan pada aspek perubahan, di mana pembangunan, perkembangan, dan modernisasi serta industrialisasi, secara keseluruhan mengandung unsur perubahan. Namun begitu, keempat hal tersebut mempunyai perbedaan yang cukup prinsipil, karena masing-masing mempunyai latar belakang, azas dan hakikat yang berbeda serta prinsip kontinuitas yang berbeda pula, meskipun semuanya merupakan bentuk yang merefleksikan perubahan (Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah, 2005).

Pembangunan (*development*) adalah proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan, dan budaya (Alexander 1994). Portes (1976) mendefinisikan pembangunan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya. Pembangunan adalah proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Menurut Deddy T. Tikson (2005) bahwa pembangunan nasional dapat pula diartikan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya secara sengaja melalui kebijakan dan strategi menuju arah yang diinginkan. Transformasi dalam struktur ekonomi, misalnya, dapat dilihat melalui peningkatan atau pertumbuhan produksi yang cepat di sektor industri dan jasa, sehingga kontribusinya terhadap pendapatan nasional semakin besar. Sebaliknya, kontribusi sektor pertanian akan menjadi semakin kecil dan berbanding terbalik dengan pertumbuhan industrialisasi dan modernisasi ekonomi. Transformasi sosial dapat dilihat melalui pendistribusian kemakmuran melalui pemerataan memperoleh akses terhadap sumber daya sosial-ekonomi, seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, air bersih, fasilitas rekreasi, dan partisipasi dalam proses pembuatan keputusan politik. Sedangkan transformasi budaya sering dikaitkan antara lain, dengan bangkitnya semangat kebangsaan

dan nasionalisme, disamping adanya perubahan nilai dan norma yang dianut masyarakat, seperti perubahan dan spiritualisme ke materialisme/sekularisme. Pergeseran dari penilaian yang tinggi kepada penguasaan materi, dari kelembagaan tradisional menjadi organisasi modern dan rasional.

Dengan demikian, proses pembangunan terjadi di semua aspek kehidupan masyarakat, ekonomi, sosial, budaya, politik, yang berlangsung pada level makro (nasional) dan mikro (*community/group*). Makna penting dari pembangunan adalah adanya kemajuan/perbaikan (*progress*), pertumbuhan dan diversifikasi.

C. Konsep Pembangunan

Sebagaimana dikemukakan oleh para ahli di atas, pembangunan adalah semua proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana. Sedangkan perkembangan adalah proses perubahan yang terjadi secara alami sebagai dampak dari adanya pembangunan (Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah, 2005).

Dengan semakin meningkatnya kompleksitas kehidupan masyarakat yang menyangkut berbagai aspek, pemikiran tentang modernisasi pun tidak lagi hanya mencakup bidang ekonomi dan industri, melainkan telah merambah ke seluruh aspek yang

dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, modernisasi diartikan sebagai proses transformasi dan perubahan dalam masyarakat yang meliputi segala aspeknya, baik ekonomi, industri, sosial, budaya, dan sebagainya.

Oleh karena dalam proses modernisasi itu terjadi suatu proses perubahan yang mengarah pada perbaikan, para ahli manajemen pembangunan menganggapnya sebagai suatu proses pembangunan di mana terjadi proses perubahan dari kehidupan tradisional menjadi modern, yang pada awal mulanya ditandai dengan adanya penggunaan alat-alat modern, menggantikan alat-alat yang tradisional.

Selanjutnya seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, termasuk ilmu-ilmu sosial, para Ahli manajemen pembangunan terus berupaya untuk menggali konsep-konsep pembangunan secara ilmiah. Secara sederhana pembangunan sering diartikan sebagai suatu upaya untuk melakukan perubahan menjadi lebih baik. Karena perubahan yang dimaksud adalah menuju arah peningkatan dari keadaan semula, tidak jarang pula ada yang mengasumsikan bahwa pembangunan adalah juga pertumbuhan. Seiring dengan perkembangannya hingga saat ini belum ditemukan adanya suatu kesepakatan yang dapat menolak asumsi tersebut. Akan tetapi untuk dapat membedakan keduanya tanpa harus memisahkan secara tegas

batasannya, Siagian (1983) dalam bukunya Administrasi Pembangunan mengemukakan, “Pembangunan sebagai suatu perubahan, mewujudkan suatu kondisi kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang lebih baik dari kondisi sekarang, sedangkan pembangunan sebagai suatu pertumbuhan menunjukkan kemampuan suatu kelompok untuk terus berkembang, baik secara kualitatif maupun kuantitatif dan merupakan sesuatu yang mutlak harus terjadi dalam pembangunan.”

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pada dasarnya pembangunan tidak dapat dipisahkan dari pertumbuhan, dalam arti bahwa pembangunan dapat menyebabkan terjadinya pertumbuhan dan pertumbuhan akan terjadi sebagai akibat adanya pembangunan. Dalam hal ini pertumbuhan dapat berupa pengembangan atau perluasan (*expansion*) atau peningkatan (*improvement*) dari aktivitas yang dilakukan oleh suatu komunitas masyarakat.

Dari sejarah perubahan dalam mengkonseptualisasikan pembangunan, terdapat berbagai variasi cara mendefinisikan pembangunan. Mula-mula pembangunan hanya diartikan dalam arti ekonomi, namun berkembang pemikiran, bahwa pembangunan tidak hanya diartikan dalam arti ekonomi, tetapi pembangunan dilihat sebagai suatu konsep yang dinamis dan bersifat multidimensional atau mencakup seluruh aspek

kehidupan manusia, seperti; ekonomi, politik, sosial budaya, dan sebagainya.

Berbagai istilah yang sering digunakan saling bergantian dalam menjelaskan pengertian pembangunan, seperti; perubahan, pertumbuhan, kemajuan, dan modernisasi. Akan tetapi istilah-istilah tersebut tidak sama makna dari arti pembangunan, karena pembangunan merupakan rujukan semua yang baik, positif, dan menyenangkan. Sementara perubahan, pertumbuhan, kemajuan, maupun modernisasi dapat saja terjadi tanpa unsur pembangunan.

Dilihat dari arti hakiki pembangunan, pada dasarnya menekankan pada aspek nilai-nilai kemanusiaan, seperti; menunjang kelangsungan hidup atau kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup, harga diri atau adanya perasaan yang layak menghormati diri sendiri dan tidak menjadi alat orang lain, kebebasan atau kemerdekaan dari penjajahan dan perbudakan. Selain itu, arti pembangunan yang paling dalam adalah kemampuan orang untuk mempengaruhi masa depannya, yang mencakup; kapasitas, keadilan, penumbuhan kuasa dan wewenang, dan saling ketergantungan.

Pengertian pembangunan sebagai suatu proses, akan terkait dengan mekanisme sistem atau kinerja suatu sistem. Menurut Easton (dalam Miriam Budiardjo, 1985), proses

sistemik paling tidak terdiri atas tiga unsur: *Pertama*, adanya input, yaitu bahan masukan konversi; *Kedua*, adanya proses konversi, yaitu wahana untuk "mengolah" bahan masukan; *Ketiga*, adanya output, yaitu sebagai hasil dari proses konversi yang dilaksanakan. Proses sistemik dari suatu sistem akan saling terkait dengan subsistem dan sistem-sistem lainnya termasuk lingkungan internasional.

Proses pembangunan sebagai proses sistemik, pada akhirnya akan menghasilkan keluaran (*output*) pembangunan, kualitas dari *output* pembangunan tergantung pada bahan masukan (*input*), kualitas dari proses pembangunan yang dilaksanakan, serta seberapa besar pengaruh lingkungan dan faktor-faktor alam lainnya. Bahan masukan pembangunan, salah satunya adalah sumber daya manusia, yang dalam bentuk konkritnya adalah manusia. Manusia dalam proses pembangunan mengandung beberapa pengertian, yaitu manusia sebagai pelaksana pembangunan, manusia sebagai perencana pembangunan, dan manusia sebagai sasaran dari proses pembangunan (*as object*).

Secara ilmu, pembangunan ekonomi, politik dapat diklasifikasi secara sosiologis ke dalam tiga kategori. *Pertama*, masyarakat yang masih bersifat tradisional; *kedua* adalah masyarakat yang bersifat peralihan; dan *ketiga* adalah

masyarakat maju. Ketiga kategori tersebut saling berkaitan, karena berada dalam satu negara. Semua negara di dunia masih mempunyai tiga kategori tersebut, meskipun dalam negara modern sekalipun. Hanya dalam negara maju lebih mempunyai kondisi sosial yang stabil, bila dibandingkan dengan kategori dari yang pertama dan ke dua.

D. Paradigma Pembangunan

Paradigma-paradigma pembangunan yang disusun oleh para teoritis dan perencanaan pembangunan tidak bisa dipungkiri lebih berputar kepada pendekatan teoritis dan keilmuan daripada sebuah kajian konseptual yang lebih mengacu kepada praktek. Pendekatan pembangunan mulai yang diwarnai oleh pendekatan ekonomi yang sejak pemikir klasik seperti Adam Smith yang mengajarkan tentang pasar dengan “*invisible hand*”nya, David Ricardo dengan perdagangan bebas antar negara dengan keunggulan komparatif, disusul Karl Marx dengan “ekonomi terpimpin”, hingga John Maynard Keynes yang mengusulkan perpaduan antara kebebasan dan pengaturan oleh pemerintah, atau yang lebih kotemporer seperti teori Tarikan Besar (*Big Push*) hingga Pertumbuhan Seimbang (*Balanced Growth*) maupun pendekatan politik kulturalis, yakni yang percaya bahwa kemajuan bisa diperoleh dengan injeksi

nilai-nilai maju (biasanya mengacu kepada nilai di negara maju sendiri) ataupun yang strukturalis, yakni yang percaya bahwa hanya perubahan secara struktural yang bisa membuat negara berkembang menjadi maju. Karena yang terjadi adalah struktur yang tidak benar, bukan nilai yang tidak benar pada amatan saya pada akhirnya merupakan akumulasi pendekatan yang saling melengkapi, dan tidak perlu saling dipertentangkan.

Pendekatan-pendekatan tersebut di atas dalam pengembangannya dalam kebijakan pembangunan cenderung bersifat sektarian, atau sangat menonjolkan salah satu dan mengabaikan yang lain. Pendekatan ini sangat khas ilmuwan. Seorang ilmuwan selalu memiliki kecongkaan untuk menerapkan pendekatan yang dikuasainya meski tidak bersifat komprehensif untuk mendapatkan pengakuan bahwa pemikiran tersebut memang unggul. Pendekatan ini cukup berbeda dengan pendekatan manajemen yang lebih bersifat memadukan seluruh pendekatan yang ada, menyusun dalam tatanan praktek dengan berusaha membuatnya tidak tumpah tindih. Pendekatan manajemen yang lebih mampu mendekati permasalahan dan menemukan solusi yang bersifat *win-win* –pendekatan ekonomi dan politik biasanya lebih bersifat “*zero sum game*”. Ini sejalan dengan apa yang dikatakan, Peter F Drucker, bahwa *only management and management alone that can create values and therefor economic prosperity*. Alasannya dapat difahami dalam

rincian sebagai berikut: Seperti dikemukakan sebelumnya, masyarakat modern adalah masyarakat yang telah berubah dari masyarakat paguyuban menjadi masyarakat organisasi. Melalui organisasi masyarakat mengembangkan kompetensi dan keunggulannya untuk bersaing dengan organisasi lain di dalam negara dan antar negara, dan pada akhirnya kompetisi antar negara bukan terjadi antar negara itu sendiri, melainkan antar organisasi di dalam negara, yaitu organisasi publik, organisasi bisnis, dan organisasi nirlaba. Meski pada akhirnya, dengan menguatnya kompetisi bisnis di dalam kompetisi global mendorong organisasi bisnis sebagai ujung tombak persaingan global. Hanya manajemen yang memampukan organisasi membentuk dirinya sebagai “organisasi” (bukan hanya sekedar “gerombolan orang-orang”) dan kemudian mengkreasikan nilai yang memberikan manfaat kepada masyarakat.

Pendekatan manajemen dimulai dengan menyusun Visi, disusul Misi, Strategi, dan Aksi pembangunan. Visi adalah arah ke mana kita hendak pergi. Visi pembangunan Indonesia adalah sebuah negara yang berisi rakyat yang makmur, mandiri, berdasarkan Pancasila dan UUD 45, artinya Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Musyawarah, dan Keadilan. Misi, adalah alasan keberadaan kita sebagai bangsa, atau *raison d'être*. Misi pembangunan Indonesia adalah sebagai sebuah negara-bangsa

yang merdeka, bersatu, dan berdaulat, di dalam kerangka kehidupan bersama umat manusia di dunia. Visi dan Misi pembangunan Indonesia harus sama bagi setiap organisasi dan masyarakat, namun aspirasinya dapat berlainan sesuai dengan tempat dan kondisi masing-masing.

BAB II

HISTORIKAL TEORI PEMBANGUNAN

A. Perkembangan Teori Pembangunan Sebelum Kemerdekaan

Dalam perkembangan sejarahnya, terlihat bahwa kapitalisme lahir lebih kurang tiga abad sebelum teori-teori pembangunan muncul. Sehingga, berbagai perdebatan terhadap teori maupun praktek pembangunan sudah berada di dalam alam kapitalisme. Karena itu, tidak mengherankan jika kapitalisme sangat mewarnai teori-teori pembangunan.

Motivasi teori modernisasi untuk merubah cara produksi masyarakat berkembang sesungguhnya adalah usaha merubah cara produksi pra-kapitalis ke kapitalis, sebagaimana negara-negara maju sudah menerapkannya untuk ditiru. Selanjutnya dalam teori dependensi yang bertolak dari analisa Marxis, dapat dikatakan hanyalah mengangkat kritik terhadap kapitalisme dari skala pabrik (majikan dan buruh) ke tingkat antar negara (sentral dan pinggiran), dengan analisis utama yang sama yaitu eksploitasi. Demikian halnya dengan teori sistem dunia yang didasari teori dependensi, menganalisis persoalan kapitalisme dengan satuan analisis dunia sebagai hanya satu sistem, yaitu sistem ekonomi kapitalis.

Tokoh-tokoh di Amerika Serikat berpendapat bahwa lahirnya teori modernisasi dilatarbelakangi adanya 3 peristiwa penting di dunia setelah usai masa Perang Dunia II, yakni:

1. Munculnya Amerika Serikat sebagai kekuatan dominan di dunia (Pemimpin Dunia);
2. Terjadinya perluasan gerakan komunis;
3. Lahirnya negara-negara merdeka baru.

Teori modernisasi banyak menerima warisan dari teori evolusi dan teori struktur fungsionalisme. Teori evolusi mampu membantu proses masa peralihan dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern di Negara-negara Eropa Barat, sedangkan pendukung dari teori modernisasi banyak di didik dalam alam pemikiran teori struktur fungsionalisme. Teori tersebut membuktikan bahwa keduanya merupakan warisan pemikiran dari para ahli sebelumnya.

Lahirnya Kedua Teori:

1. Teori Evolusi

Lahir pada awal abad ke 19 yang dapat menghapuskan tatanan lama dan membentuk acuan dasar baru dengan menerapkan teknologi baru dan ilmu pengetahuan untuk menciptakan tata cara baru dengan menghasilkan produksi yang lebih efisien.

2. Teori Struktur Fungsionalisme

Pemikiran seorang ahli biologi “Talcott Parsons” banyak memberi pengaruh dengan rumusan teori fungsionalismenya. Parson berpikir bahwa manusia tak ubahnya seperti organ tubuh yang dapat dipelajari, adapun penjelasannya adalah: *pertama*, bagian tubuh manusia saling berhubungan satu dengan yang lain. *Kedua*; setiap bagian tubuh manusia mempunyai fungsi yang jelas dan khas (spesifik). Perumpamaan ini menggambarkan dengan sebuah bentuk kelembagaan dalam masyarakat yang harus mampu melaksanakan tugas tertentu untuk stabilitas dan pertumbuhan masyarakat bersangkutan. Agar kelembagaan masyarakat tidak mati, Parsons menggambarkan 4 macam tugas utama:

- a) *Adaptation to the environment* (fungsi lembaga ekonomi adalah adaptasi terhadap lingkungan);
- b) *Goal attainment* (fungsi pemerintahan adalah pencapaian tujuan);
- c) *Integration* (fungsi lembaga hukum dan agama adalah menjalankan integrasi) (penggabungan/penyatuan);
- d) *Latency* (fungsi keluarga dan lembaga pendidikan adalah uaha pemeliharaan).

Penjelasan terhadap tugas utama menurut Parsons dapat dijelaskan ke dalam empat fungsi pokok, yaitu:

- a) Fungsi lembaga ekonomi adalah adaptasi lingkungan;
- b) Fungsi pemerintahan adalah mencapai tujuan;
- c) Fungsi lembaga hukum dan agama adalah menjalankan integrasi;
- d) Fungsi keluarga dan lembaga pendidikan adalah usaha pemeliharaan.

Rumusan Konsep “Talcott Parsons”

Konsep teori yang diajukan oleh Parsons adalah keseimbangan dinamis stasioner (*Homeostatic Aquilibrium*), artinya jika bagian tubuh manusia berubah maka bagian lain akan mengikutinya. Teori struktur fungsionalisme Parsons sering di sebut konservatif, dalam artian menganggap bahwa masyarakat akan selalu berada pada situasi harmoni, stabil, seimbang dan mapan.

Ada beberapa pemikiran klasik teori modernisasi yang telah dikemukakan oleh para ahli, yakni:

1. Smelsen, tentang differensiensi struktural bahwa teori modernisasi akan selalu melibatkan diferensiensi struktural.

2. Rostow, mengatakan bahwa pembangunan ekonomi ada lima tahapan, dan yang dianggap sebagai tahapan paling kritis adalah tahap tinggal landas.
3. Coleman, tentang pembangunan politik yang berkeadilan, bahwa ketiga teori pembangunan mirip dengan pendekatan sosiologis.
4. Asumsi, tentang teoritis dan metodologi bahwa teori modernisasi juga memberikan rumusan kebijaksanaan pembangunan.
5. Implikasi, tentang kebijaksanaan pembangunan bahwa teori modernisasi mampu menawarkan berbagai implikasi kebijaksanaan pembangunan.

Implikasi Kebijakan Pembangunan

Dalam merumuskan kerangka teori dan metode pengkajiannya, teori modernisasi mampu menurunkan berbagai implikasi kebijaksanaan pembangunan yang perlu diikuti oleh Negara dunia ketiga dalam usaha memodernisasikan dirinya. Ada tiga implikasi teori modernisasi yang dapat dikemukakan di sini, yaitu:

1. Pembeneran kekuatan masyarakat tradisional dan modern.
2. Menilai ideology komunis sebagai ancaman pembangunan dunia ketiga.

3. Mampu memberikan legitimasi tentang perlunya bantuan asing.

B. Perkembangan Teori Pembangunan Setelah Kemerdekaan

Tanggal 20 Januari 1949, Presiden Amerika Serikat, Harry S. Truman kali pertama menyitir istilah “developmentalism”. Untuk selanjutnya, ia mempropagandakan istilah *under-development* bagi negara-negara bekas jajahan agar mampu meredam pengaruh Komunisme-Sosialisme sebagai tawaran ideologi pembangunan, (Stephen Gill, 1993:248)

Teori Modernisasi lahir sekitar tahun 1950-an di Amerika Serikat sebagai wujud respon kaum intelektual atas Perang Dunia II yang telah menyebabkan munculnya negara-negara Dunia Ketiga. Kelompok negara miskin yang ada dalam istilah Dunia Ketiga adalah negara bekas jajahan perang yang menjadi bahan rebutan pelaku Perang Dunia II. Sebagai negara yang telah mendapatkan pengalaman sekian waktu sebagai negara jajahan, kelompok Dunia Ketiga berupaya melakukan pembangunan untuk menjawab pekerjaan rumah mereka yaitu kemiskinan, pengangguran, gangguan kesehatan, pendidikan rendah, rusaknya lingkungan, kebodohan, dan beberapa problem lain.

Secara etimologis, ada beberapa tokoh yang mengajukan pendapat tentang makna modernisasi. Everett M. Rogers dalam “Modernization Among Peasants: The 10 Impact of Communication” menyatakan bahwa modernisasi merupakan proses dimana individu berubah dari cara hidup tradisional menuju gaya hidup lebih kompleks dan maju secara teknologis serta cepat berubah.

Cyril E. Black dalam “Dinamics of Modernization” berpendapat bahwa secara historis modernisasi adalah proses perkembangan lembaga-lembaga secara perlahan disesuaikan dengan perubahan fungsi secara cepat dan menimbulkan peningkatan yang belum pernah dicapai sebelumnya dalam hal pengetahuan manusia. Dengan pengetahuan tersebut, akan memungkinkan manusia untuk menguasai lingkungannya dan melakukan revolusi ilmiah.

Daniel Lerner dalam “The Passing of Traditional Society: Modernizing the Middle East” menyatakan bahwa modernisasi merupakan suatu *trend unilateral* yang sekuler dalam mengarahkan cara-cara hidup dari tradisional menjadi partisipan. Marion Ievy dalam “Modernization and the Structure of Societies” juga menyatakan bahwa modernisasi adalah adanya penggunaan ukuran rasio sumberdaya kekuasaan, jika

makin tinggi rasio tersebut, maka modernisasi akan semakin mungkin terjadi.

Dari beberapa definisi tersebut, modernisasi dapat dipahami sebagai sebuah upaya tindakan menuju perbaikan dari kondisi sebelumnya. Selain upaya, modernisasi juga berarti proses yang memiliki tahapan dan waktu tertentu dan terukur.

Sebagaimana sebuah teori, Modernisasi memiliki asumsi dasar yang menjadi pangkal hipotesisnya dalam menawarkan rekayasa pembangunan. *Pertama*, kemiskinan dipandang oleh Modernisasi sebagai masalah internal dalam sebuah negara (Arief Budiman, 2000:18). Kemiskinan dan problem pembangunan yang ada lebih merupakan akibat dari keterbelakangan dan kebodohan internal yang berada dalam sebuah negara, bukan merupakan problem yang dibawa oleh faktor dari luar negara. Jika ada seorang warga yang miskin sehingga ia tidak mampu mencukupi kebutuhan gizinya, maka penyebab utama dari fakta tersebut adalah orang itu sendiri dan negara dimana orang tersebut berada, bukan disebabkan orang atau negara lain. Artinya, yang paling pantas dan layak melakukan penyelesaian masalah atas kasus tersebut adalah orang dan negara dimana orang itu berada, bukan negara lain. *Kedua*, muara segala problem adalah kemiskinan, pembangunan berarti perang terhadap kemiskinan. Jika pembangunan ingin

berhasil, maka yang kali pertama harus dilakukan adalah menghilangkan kemiskinan dari sebuah negara. Cara paling tepat menurut Modernisasi untuk menghilangkan kemiskinan adalah dengan ketersediaan modal untuk melakukan investasi. Semakin tinggi tingkat investasi di sebuah negara, maka secara otomatis, pembangunan telah berhasil, (Mansour Fakih, 2002:44-47).

Teori Modernisasi adalah teori pembangunan yang menyatakan bahwa pembangunan dapat dicapai melalui mengikuti proses pengembangan yang digunakan oleh negara-negara berkembang saat ini. Teori tindakan Talcott Parsons 'mendefinisikan kualitas yang membedakan "modern" dan "tradisional" masyarakat. Pendidikan dilihat sebagai kunci untuk menciptakan individu modern. Teknologi memainkan peran kunci dalam teori pembangunan karena diyakini bahwa teknologi ini dikembangkan dan diperkenalkan kepada negara-negara maju yang lebih rendah akan memacu pertumbuhan ekonomi. Salah satu faktor kunci dalam Teori Modernisasi adalah keyakinan bahwa pembangunan memerlukan bantuan dari negara-negara maju untuk membantu negara-negara berkembang untuk belajar dari perkembangan mereka. Dengan demikian, teori ini dibangun di atas teori bahwa ada kemungkinan untuk pengembangan yang sama dicapai antara negara maju dan dikembangkan lebih rendah.

C. Teori Dependensi (Ketergantungan)

Secara historis, teori Dependensi lahir atas ketidakmampuan teori Modernisasi membangkitkan ekonomi negara-negara terbelakang, terutama negara di bagian Amerika Latin. Secara teoritik, teori Modernisasi melihat bahwa kemiskinan dan keterbelakangan yang terjadi di negara Dunia Ketiga terjadi karena faktor internal di negara tersebut. Karena faktor internal itulah kemudian negara Dunia Ketiga tidak mampu mencapai kemajuan dan tetap berada dalam keterbelakangan.

Paradigma inilah yang kemudian dibantah oleh teori Dependensi. Teori ini berpendapat bahwa kemiskinan dan keterbelakangan yang terjadi di negara-negara Dunia Ketiga bukan disebabkan oleh faktor internal di negara tersebut, namun lebih banyak ditentukan oleh faktor eksternal dari luar negara Dunia Ketiga itu. Faktor luar yang paling menentukan keterbelakangan negara Dunia Ketiga adalah adanya campur tangan dan dominasi negara maju pada laju pembangunan di negara Dunia Ketiga. Dengan campur tangan tersebut, maka pembangunan di negara Dunia Ketiga tidak berjalan dan berguna untuk menghilangkan keterbelakangan yang sedang terjadi, namun semakin membawa kesengsaraan dan keterbelakangan. Keterbelakangan jilid dua di negara Dunia Ketiga ini disebabkan oleh ketergantungan yang diciptakan oleh

campur tangan negara maju kepada negara Dunia Ketiga. Jika pembangunan ingin berhasil, maka ketergantungan ini harus diputus dan biarkan negara Dunia Ketiga melakukan roda pembangunannya secara mandiri.

Ada dua hal utama dalam masalah pembangunan yang menjadi karakter kaum Marxis Klasik. *Pertama*, negara pinggiran yang pra-kapitalis adalah kelompok negara yang tidak dinamis dengan cara produksi Asia, tidak feodal dan dinamis seperti tempat lahirnya kapitalisme, yaitu Eropa. *Kedua*, negara pinggiran akan maju ketika telah disentuh oleh negara pusat yang membawa kapitalisme ke negara pinggiran tersebut. Ibaratnya, negara pinggiran adalah seorang putri cantik yang sedang tertidur, ia akan bangun dan mengembangkan potensi kecantikannya setelah disentuh oleh pangeran tampan. Pangeran itulah yang disebut dengan negara pusat dengan ketampanan yang dimilikinya, yaitu kapitalisme. Pendapat inilah yang kemudian dibantah oleh teori Dependensi.

Bantahan teori Dependensi atas pendapat kaum Marxis Klasik ini juga ada dua hal. *Pertama*, negara pinggiran yang pra-kapitalis memiliki dinamika tersendiri yang berbeda dengan dinamika negara kapitalis. Bila tidak mendapat sentuhan dari negara kapitalis yang telah maju, mereka akan bergerak dengan sendirinya mencapai kemajuan yang diinginkannya. *Kedua*,

justro karena dominasi, sentuhan dan campur tangan negara maju terhadap negara Dunia Ketiga, maka negara pra-kapitalis menjadi tidak pernah maju karena tergantung kepada negara maju tersebut. Ketergantungan tersebut ada dalam format “neo-kolonialisme” yang diterapkan oleh negara maju kepada negara Dunia Ketiga tanpa harus menghapuskan kedaulatan negara Dunia Ketiga, (Arief Budiman, 2000:62-63).

Teori Dependensi kali pertama muncul di Amerika Latin. Pada awal kelahirannya, teori ini lebih merupakan jawaban atas kegagalan program yang dijalankan oleh ECLA (*United Nation Economic Commission for Latin Amerika*) pada masa awal tahun 1960-an. Lembaga tersebut dibentuk dengan tujuan untuk mampu menggerakkan perekonomian di negara-negara Amerika Latin dengan membawa percontohan teori Modernisasi yang telah terbukti berhasil di Eropa.

Teori Dependensi juga lahir atas respon ilmiah terhadap pendapat kaum Marxis Klasik tentang pembangunan yang dijalankan di negara maju dan berkembang. Aliran neo-marxisme yang kemudian menopang keberadaan teori Dependensi ini.

Tentang imperialisme, kaum Marxis Klasik melihatnya dari sudut pandang negara maju yang melakukannya sebagai bagian dari upaya manifestasi Kapitalisme Dewasa, sedangkan

kalangan Neo-Marxis melihatnya dari sudut pandang negara pinggiran yang terkena akibat penjajahan. Dalam dua tahapan revolusi, Marxis Klasik berpendapat bahwa revolusi borjuis harus lebih dahulu dilakukan baru kemudian revolusi proletar. Sedangkan Neo-Marxis berpendapat bahwa kalangan borjuis di negara terbelakang pada dasarnya adalah alat atau kepanjangan tangan dari imperialis di negara maju. Maka revolusi yang mereka lakukan tidak akan membawa perubahan di negara pinggiran, terlebih lagi, revolusi tersebut tidak akan mampu membebaskan kalangan proletar di negara berkembang dari eksploitasi kekuatan alat-alat produksi kelompok borjuis di negara tersebut dan kaum borjuis di negara maju.

Tokoh utama dari teori Dependensi adalah Theotonio Dos Santos dan Andre Gunder Frank. Theotonio Dos Santos sendiri mendefinisikan bahwa ketergantungan adalah hubungan relasional yang tidakimbang antara negara maju dan negara miskin dalam pembangunan di kedua kelompok negara tersebut. Dia menjelaskan bahwa kemajuan negara Dunia Ketiga hanyalah akibat dari ekspansi ekonomi negara maju dengan kapitalismenya. Jika terjadi sesuatu negatif di negara maju, maka negara berkembang akan mendapat dampak negatifnya pula. Sedangkan jika hal negatif terjadi di negara berkembang, maka belum tentu negara maju akan menerima dampak tersebut. Sebuah hubungan yang tidakimbang. Artinya, positif-negatif

dampak berkembang pembangunan di negara maju akan dapat membawa dampak pada negara, (theotonio dos santos, review, vol. 60, 231).

Dalam perkembangannya, teori Dependensi terbagi dua, yaitu Dependensi Klasik yang diwakili oleh Andre Gunder Frank dan Theotonio Dos Santos, dan Dependensi Baru yang diwakili oleh F.H. Cardoso.

Teori Ketergantungan yang dikembangkan pada akhir 1950an di bawah bimbingan Direktur Komisi Ekonomi PBB untuk Amerika Latin, Raul Prebisch. Prebisch dan rekan-rekannya di picu oleh kenyataan bahwa pertumbuhan ekonomi di negara-negara industri maju tidak harus menyebabkan pertumbuhan di negara-negara miskin. Memang, studi mereka menyarankan bahwa kegiatan ekonomi di negara-negara kaya sering menyebabkan masalah ekonomi yang serius di negara-negara miskin. Kemungkinan seperti itu tidak diprediksi oleh teori neoklasik, yang diasumsikan bahwa pertumbuhan ekonomi bermanfaat bagi semua, bahkan jika tidak bermanfaat tidak selalu ditanggung bersama. Penjelasan awal Prebisch untuk fenomena ini sangat jelas: negara-negara miskin mengekspor komoditas primer ke negara-negara kaya yang kemudian memproduksi produk dari komoditas tersebut dan mereka jual kembali ke negara-negara miskin.

Tiga masalah membuat kebijakan ini sulit untuk diikuti. Yang pertama adalah bahwa pasar internal negara-negara miskin tidak cukup besar untuk mendukung skala ekonomi yang digunakan oleh negara-negara kaya untuk menjaga harga rendah. Isu kedua menyangkut akan politik negara-negara miskin untuk apakah transformasi menjadi produsen utama produk itu mungkin atau diinginkan. Isu terakhir berkisar sejauh mana negara-negara miskin sebenarnya memiliki kendali produk utama mereka, khususnya di bidang penjualan produk-produk luar negeri. Hambatan-hambatan dengan kebijakan substitusi impor menyebabkan orang lain berpikir sedikit lebih kreatif dan historis pada hubungan antara negara-negara kaya dan miskin.

Pada titik ini teori ketergantungan itu dipandang sebagai sebuah cara yang mungkin untuk menjelaskan kemiskinan terus-menerus dari negara-negara miskin. Pendekatan neoklasik tradisional mengatakan hampir tidak ada pada pertanyaan ini kecuali untuk menegaskan bahwa negara-negara miskin terlambat datang ke praktik-praktik ekonomi yang padat dan begitu mereka mempelajari teknik-teknik ekonomi modern, maka kemiskinan akan mulai mereda. Ketergantungan dapat didefinisikan sebagai suatu penjelasan tentang pembangunan ekonomi suatu negara dalam hal pengaruh eksternal - politik, ekonomi, dan budaya - pada kebijakan pembangunan nasional (Osvaldo Sunkel, "Kebijakan Pembangunan Nasional dan

Eksternal Ketergantungan di Amerika Latin," *Jurnal Studi Pembangunan*, Vol. 6. No. 1 Oktober 1969, hal. 23).

1. Raul Prebisch: industri substitusi impor. Menurutnya negara-negara terbelakang harus melakukan industrialisasi yang dimulai dari industri substitusi impor.
2. Perdebatan tentang imperialisme dan kolonialisme. Hal ini muncul untuk menjawab pertanyaan tentang apa alasan bangsa-bangsa Eropa melakukan ekspansi dan menguasai negara-negara lain secara politisi dan ekonomis. Ada tiga teori:
 - 1) Teori God: Adanya misi menyebarkan agama.
 - 2) Teori Glory: Kehausan akan kekuasaan dan kebesaran.
 - 3) Teori Gospel: Motivasi demi keuntungan ekonomi.
3. Paul Baran: Sentuhan Yang Mematikan Dan Kretinisme. Baginya perkembangan kapitalisme di negara-negara pinggiran beda dengan kapitalisme di negara-negara pusat. Di negara pinggiran, sistem kapitalisme seperti terkena penyakit kretinisme yang membuat orang tetap kerdil.

Ada 2 (dua) tokoh yang membahas dan menjabarkan pemikirannya sebagai kelanjutan dari tokoh-tokoh di atas, yakni:

1. Andre Guner Frank: Pembangunan keterbelakangan. Bagi Frank keterbelakangan hanya dapat diatasi dengan revolusi, yakni revolusi yang melahirkan sistem sosialis.

2. Theotonia De Santos: Membantah Frank. Menurutnya ada 3 bentuk ketergantungan, yakni:
 - a. Ketergantungan Kolonial: hubungan antar penjajah dan penduduk setempat bersifat eksploitatif.
 - b. Ketergantungan Finansial-Industri: pengendalian dilakukan melalui kekuasaan ekonomi dalam bentuk kekuasaan financial-industri.
 - c. Ketergantungan Teknologis-Industrial: penguasaan terhadap surplus industri dilakukan melalui monopoli teknologi industri.

D. Enam Bagian Pokok dari Teori Independensi

1. Pendekatan Keseluruhan Melalui Pendekatan Kasus. Gejala ketergantungan dianalisis dengan pendekatan keseluruhan yang memberi tekanan pada sistem dunia. Ketergantungan adalah akibat proses kapitalisme global, dimana negara pinggiran hanya sebagai pelengkap. Keseluruhan dinamika dan mekanisme kapitalis dunia menjadi perhatian pendekatan ini.
2. Pakar Eksternal Melawan Internal. Para pengikut teori ketergantungan tidak sependapat dalam penekanan terhadap dua faktor ini, ada yang beranggapan bahwa faktor eksternal lebih ditekankan, seperti Frank Des Santos. Sebaliknya ada

yang menekan faktor internal yang mempengaruhi/menyebabkan ketergantungan, seperti Cordosa dan Faletto.

3. Analisis Ekonomi Melawan Analisis Sosiopolitik. Raul Plebiech memulainya dengan memakai analisis ekonomi dan penyelesaian yang ditawarkan juga bersifat ekonomi. AG Frank seorang ekonom, dalam analisisnya memakai disiplin ilmu sosial lainnya, terutama sosiologi dan politik. Dengan demikian teori ketergantungan dimulai sebagai masalah ekonomi kemudian berkembang menjadi analisis sosial politik dimana analisis ekonomi hanya merupakan bagian dan pendekatan yang multi dan interdisipliner analisis sosiopolitik menekankan analisa kelas, kelompok sosial dan peran pemerintah di negara pinggiran.
4. Kontradiksi Sektoral/Regional Melawan Kontradiksi Kelas. Salah satu kelompok penganut ketergantungan sangat menekankan analisis tentang hubungan negara-negara pusat dengan pinggiran ini merupakan analisis yang memakai kontradiksi regional. Tokohnya adalah AG Frank. Sedangkan kelompok lainya menekankan analisis kelas, seperti Cardoso.
5. Keterbelakangan Melawan Pembangunan. Teori ketergantungan sering disamakan dengan teori tentang keterbelakangan dunia ketiga. Seperti dinyatakan oleh Frank.

Para pemikir teori ketergantungan yang lain seperti Dos Santos, Cardoso, Evans menyatakan bahwa ketergantungan dan pembangunan bisa berjalan seiring. Yang perlu dijelaskan adalah sebab, sifat dan keterbatasan dari pembangunan yang terjadi dalam konteks ketergantungan.

6. Voluntarisme Melawan Determinisme. Penganut marxis klasik melihat perkembangan sejarah sebagai suatu yang deterministic. Masyarakat akan berkembang sesuai tahapan dari feodalisme ke kapitalisme dan akan kepada sosialisme. Penganut Neo Marxis seperti Frank kemudian mengubahnya melalui teori ketergantungan. Menurutnya kapitalisme negara-negara pusat berbeda dengan kapitalisme negara pinggiran. Kapitalisme negara pinggiran adalah keterbelakangan karena itu perlu di ubah menjadi negara sosialis melalui sebuah revolusi. Dalam hal ini Frank adalah penganut teori voluntaristik.

E. Dasar Teori Sistem Dunia

Teori sistem dunia adalah adanya bentuk hubungan negara dalam sistem dunia yang terbagi dalam tiga bentuk negara yaitu negara sentral, negara semi pinggiran dan negara pinggiran. Ketiga bentuk negara tersebut terlibat dalam

hubungan yang harmonis secara ekonomis dan kesemuanya akan bertujuan untuk menuju pada bentuk negara sentral yang mapan secara ekonomi. Perubahan status negara pinggiran menuju negara semi pinggiran ditentukan oleh keberhasilan negara pinggiran melaksanakan salah satu atau kombinasi dari strategi pembangunan, yaitu strategi menangkap dan memanfaatkan peluang, strategi promosi dengan undangan dan strategi berdiri di atas kaki sendiri. Sedangkan upaya negara semi pinggiran menuju negara sentral bergantung pada kemampuan negara semi pinggiran melakukan perluasan pasar serta introduksi teknologi modern. Kemampuan bersaing di pasar internasional melalui perang harga dan kualitas.

Negara semi pinggiran yang disampaikan oleh Wallerstein merupakan sebuah pelengkap dari konsep sentral dan pinggiran yang disampaikan oleh teori dependensi. Alasan sederhana yang disampaikan adalah, banyak negara yang tidak termasuk dalam dua kategori tersebut sehingga Wallerstein mencoba menawarkan konsep pembagian dunia menjadi tiga kutub yaitu sentral, semi pinggiran dan pinggiran.

Terdapat dua alasan yang menyebabkan sistem ekonomi kapitalis dunia saat ini memerlukan kategori semi pinggiran, yaitu dibutuhkannya sebuah perangkat politik dalam mengatasi disintegrasi sistem dunia dan sarana pengembangan modal untuk

industri dari negara sentral. Disintegrasi sistem dunia sangat mungkin terjadi sebagai akibat “kecemburuan” negara pinggiran dengan kemajuan yang dialami oleh negara sentral. Kekhawatiran akan timbulnya gejala disintegrasi ini dikarenakan jumlah negara miskin yang sangat banyak harus berhadapan dengan sedikit negara maju. Solusi yang ditawarkan adalah membentuk kelompok penengah antara keduanya atau dengan kata lain adanya usaha mengurangi disparitas antara negara maju dan negara miskin. Secara ekonomi, negara maju akan mengalami kejenuhan investasi sehingga diperlukan perluasan atau ekspansi pada negara lain. Upaya perluasan investasi ini membutuhkan lokasi baru pada negara miskin. Negara ini kemudian dikenal dengan istilah negara semi pinggiran, Wallerstein mengajukan tesis tentang perlunya gerakan populis berskala nasional digantikan oleh perjuangan kelas berskala dunia. Lebih jauh Wallerstein menyatakan bahwa pembangunan nasional merupakan kebijakan yang merusak tata sistem ekonomi dunia. Alasan yang disampaikan olehnya, antara lain:

1. Impian tentang keadilan ekonomi dan politik merupakan suatu keniscayaan bagi banyak negara.
2. Keberhasilan pembangunan pada beberapa negara menyebabkan perubahan radikal dan global terhadap sistem ekonomi dunia.

3. Strategi pertahanan surplus ekonomi yang dilakukan oleh produsen berbeda dengan perjuangan kelas yang berskala nasional.

BAB III

PERUBAHAN SOSIAL DAN PEMBANGUNAN

A. Definisi

Pengertian tentang perubahan sosial mudah dijumpai. Hal ini disebabkan oleh luasnya cakupan pembahasan perubahan sosial. Perubahan sosial mencakup ilmu sosial politik, budaya, ekonomi, bahkan pada persoalan tehnik sipil, industri, dan informasi. Perubahan sosial dapat terjadi di segala bidang, dan pendorong perubahan sosial dapat disebabkan oleh segala bidang utamanya bidang ilmu yang disebutkan di atas. Meskipun perubahan sosial terjadi di segala bidang seperti yang disebutkan tadi, perubahan sosial memiliki satu arti yang sama, yaitu pergeseran sesuatu menuju yang baru. Namun menjadi arti yang berbeda ketika didefinisikan berdasarkan bidang atau spesifikasi ilmu. Berikut definisi perubahan sosial menurut beberapa ahli.

William F. Ogburn mengemukakan bahwa ruang lingkup perubahan-perubahan sosial mencakup unsur-unsur kebudayaan yang materiil maupun immateriil dengan menekankan bahwa pengaruh yang besar dari unsur-unsur immaterial.

Kingsley Davis mengartikan perubahan sosial sebagai perubahan yang terjadi dalam fungsi dan struktur masyarakat. Perubahan-perubahan sosial dikatakannya sebagai perubahan dalam hubungan sosial (*sosial relationship*) atau sebagai perubahan terhadap keseimbangan (*equilibrium*) hubungan sosial tersebut.

Gillin dan Gillin mengatakan bahwa perubahan-perubahan sosial untuk suatu variasi cara hidup yang lebih diterima yang disebabkan baik karena perubahan kondisi geografis, kebudayaan materiil, kompetisi penduduk, ideologi, maupun karena adanya difusi atau perubahan-perubahan baru dalam masyarakat tersebut.

Sole Soemardjan mengatakan perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosial, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap-sikap dan pola perilaku diantara kelompok dalam masyarakat.

Prof. Dr. M. Tahir Kasnawi mengartikan perubahan sosial merupakan suatu proses perubahan, modifikasi, atau penyesuaian-penyesuaian yang terjadi dalam pola hidup masyarakat, yang mencakup nilai-nilai budaya, pola perilaku kelompok masyarakat, hubungan-hubungan sosial ekonomi,

serta kelembagaan-kelembagaan masyarakat, baik dalam aspek kehidupan material maupun nonmateri.

B. Perubahan Sosial dalam Perspektif Karl Marx

Pengaruh pemikiran Karl Marx tidak bisa diragukan lagi dalam sejarah perjalanan dunia ini. Marx tidak hanya merangsang perubahan cara berpikir, akan tetapi juga mengubah cara manusia bertindak. Seperti dikatakan Marx sendiri, “Para filosof hanya menginterpretasikan dunia dalam berbagai cara; masalahnya adalah bagaimana mengubah dunia.” Hal inilah yang kemudian membedakan Marx dari filosof lain, misalnya, Auguste Comte atau Martin Heidegger, bahkan David Hume yang hanya sanggup mengubah cara manusia berfikir. Meskipun tidak bisa dipungkiri juga bahwa perubahan pemikiran ini berdampak pada kehidupan masyarakat luas, namun efeknya tidak sebesar Karl Marx. Filsafat Marx lebih diletakkan untuk mengubah dunia. Bahkan sebagai ideologi, “Marxisme” menyemangati sebagian besar gerakan buruh sejak akhir abad ke-19 dan dalam abad ke-20 yang mendasari kebanyakan gerakan pembebasan sosial.

Dalam pandangannya, filsafat tidak boleh statis, tetapi harus aktif membuat perubahan-perubahan karena yang terpenting adalah perbuatan dan materi, bukan ide-ide. Manusia

selalu terkait dengan hubungan-hubungan kemasyarakatan yang melahirkan sejarah. Marx membalik dialektika ide Hegel menjadi dialektika materi. Apabila Hegel menyatakan bahwa kesadaranlah yang menentukan realitas, maka Marx mendekonstruksinya dengan mengatakan bahwa praksis materiallah yang menentukan kesadaran.

Materialisme adalah teori yang menyatakan bahwa semua bentuk dapat diterangkan melalui hukum yang mengatur materi dan gerak. Materialisme berpendapat bahwa semua kejadian dan kondisi adalah sebab akibat lazim dari kejadian-kejadian dan kondisi-kondisi sebelumnya. Dengan demikian, materialisme selalu memberikan penekanan bahwa materi merupakan ukuran segalanya, melalui paradigma materi ini segala sesuatu dapat diterangkan.

Materialisme dialektis memiliki asumsi dasar bahwa benda merupakan suatu kenyataan pokok, bahwa kenyataan itu benar-benar objektif, tidak semata berada dalam kesadaran manusia. Konsekuensi logisnya adalah pengetahuan realitas secara otomatis menjadi tidak bisa dipisahkan dengan kesadaran manusia. Bahkan materialisme mengakui bahwa kenyataan berada di luar persepsi kita tentangnya, sehingga kenyataan obyektif adalah penentu terakhir terhadap ide.

Pembalikan Marx dari idealisme Hegel ke materialisme memang tidak berarti ia meninggalkan dialektika Hegel. Materialisme Marx adalah materialisme dialektis yang meyakini kebudayaan akan mengalami kemajuan. Jika dalam Hegel adalah realisasi total roh absolut, maka dalam Marx kemajuan kualitatif tersebut berupa masyarakat tanpa kelas (masyarakat yang tidak lagi didominasi materi). Visi Marx untuk mewujudkan masyarakat tanpa kelas merupakan gambaran praksis dari ide dasar materialisme sosialisnya. Sistem feodal yang tergantikan oleh sistem kapitalis telah membawa perubahan dalam struktur ekonomi dan sosial. Marx yakin suatu saat, kapitalisme akan menemui kehancuran dan melahirkan sintesis, komunis sebagai ideologi kekuatan baru, masyarakat tanpa kelas

C. Lima Tahap Pertumbuhan Ekonomi: W.W. Rostow

Selama tahapan ini, tingkat investasi menjadi lebih tinggi dan hal itu memulai sebuah pembangunan yang dinamis. Model perkembangan ini merupakan hasil revolusi industri. Konsekuensi perubahan ini, yang mencakup juga pada perkembangan pertanian, yaitu tekanan kerja pada sektor-sektor primer berlebihan. Sebuah prasyarat untuk pra-kondisi tinggal landas

adalah revolusi industri yang berlangsung dalam satu abad terakhir.

5 tahap Pembangunan W.W. Rostow

a. Masyarakat Tradisional

Ilmu pengetahuan pada masyarakat ini masih belum banyak dikuasai. Karena itu, masyarakat semacam ini masih dikuasai oleh kepercayaan-kepercayaan tentang kekuatan di luar kekuasaan manusia. Manusia dengan demikian tunduk kepada alam, belum bisa menguasai alam. Akibatnya, produksi masih sangat terbatas. Masyarakat ini cenderung bersifat statis, dalam arti kemajuan berjalan dengan sangat lambat. Produksi dipakai untuk konsumsi. Tidak ada investasi. Pola dan tingkat kehidupan generasi kedua pada umumnya hampir sama dengan kehidupan generasi sebelumnya. Masyarakat tradisional diartikan sebagai suatu masyarakat yang strukturnya berkembang di sepanjang fungsi produksi. Struktur social masyarakat ini berjenjang. Kekuasaan politik atau pemerintahan berpusat di daerah.

b. Prakondisi untuk Lepas Landas

Masyarakat tradisional, meskipun sangat lambat, terus bergerak. Pada suatu titik, dia mencapai posisi prakondisi untuk lepas landas. Biasanya, keadaan ini terjadi karena adanya campur tangan dari luar, dari masyarakat yang sudah

lebih maju. Perubahan ini tidak datang karena faktor-faktor internal masyarakat tersebut, karena pada dasarnya masyarakat tradisional tidak mampu untuk mengubah dirinya sendiri. Campur tangan dari luar ini menggoncangkan masyarakat tradisional itu. Di dalamnya mulai berkembang ide pembaharuan.

Ide-ide yang berkembang ini bukan sekedar pendapat yang menyatakan bahwa kemajuan ekonomi dapat dicapai, tetapi bahwa kemajuan ekonomi merupakan suatu kondisi yang diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan lain yang dianggap baik: kebesaran bangsa, keuntungan pribadi, kemakmuran umum, atau kehidupan yang lebih baik bagi anak-anak mereka nantinya

Misalnya, seperti yang terjadi di Jepang, dengan dibukanya masyarakat ini oleh armada angkatan laut Amerika Serikat. Pada periode ini, usaha untuk meningkatkan tabungan masyarakat terjadi. Tabungan ini kemudian dipakai untuk melakukan investasi pada sektor-sektor produktif yang menguntungkan, termasuk misalnya pendidikan. Investasi ini dilakukan baik oleh perorangan maupun oleh negara. Sebuah negara nasional yang sentalistis juga terbentuk. Pendeknya, segala usaha untuk meningkatkan produksi mulai bergerak dalam periode ini.

c. Lepas Landas

Periode ini ditandai dengan tersingkirnya hambatan-hambatan yang mengalami proses pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan merupakan sesuatu yang berjalan wajar, tanpa adanya hambatan yang berarti seperti ketika pada periode prakondisi untuk lepas landas. Pada periode ini, tabungan dan investasi yang efektif meningkat dari 5% menjadi 10% dari pendapatan nasional atau lebih. Juga, industri-industri baru mulai berkembang dengan sangat pesat. Keuntungannya sebagian besar ditanamkan kembali ke pabrik yang baru. Sector modern dari perekonomian dengan demikian jadi berkembang.

Dalam pertanian, teknik-teknik baru juga tumbuh. Pertanian menjadi usaha komersial untuk mencari keuntungan dan bukan sekedar untuk konsumsi. Peningkatan dalam produktivitas pertanian merupakan sesuatu yang penting dalam proses lepas landas, karena proses modernisasi masyarakat membutuhkan hasil pertanian yang banyak, supaya ongkos perubahannya tidak terlalu mahal.

d. Bergerak ke Kedewasaan

Setelah lepas landas, akan terjadi proses kemajuan yang terus bergerak ke depan, meskipun kadang-kadang terjadi pasang surut antara 10% sampai 20% dari pendapatan nasional

selalu diinvestasikan kembali, supaya bisa mengatasi persoalan pertumbuhan penduduk.

Industri berkembang dengan pesat. Negara ini memantapkan posisinya dalam perekonomian global: barang-barang yang tadinya diimpor sekarang diproduksi di dalam negeri; impor baru menjadi kebutuhan, sementara ekspor barang-barang baru mengimbangi impor.

Sesudah 60 tahun sejak sebuah negara lepas landas (atau 40 tahun setelah periode lepas landas berakhir), tingkat kedewasaan biasanya tercapai. Perkembangan industri terjadi tidak saja meliputi teknik-teknik produksi, tetapi juga dalam aneka barang yang diproduksi. Yang diproduksi bukan saja terbatas pada barang konsumsi, tetapi juga barang modal.

e. Jaman Konsumsi Masal yang Tinggi

Karena kenaikan pendapatan masyarakat, konsumsi tidak lagi terbatas pada kebutuhan pokok untuk hidup, tetapi meningkat ke kebutuhan yang lebih tinggi. Produksi industri juga berubah, dari kebutuhan dasar menjadi kebutuhan barang konsumsi yang tahan lama.

Pada periode ini, investasi untuk meningkatkan produksi tidak lagi menjadi tujuan yang paling utama. Sesudah taraf kedewasaan dicapai, surplus ekonomi akibat proses politik

yang terjadi dialokasikan untuk kesejahteraan social dan penambahan dana sosial. Pada titik ini, pembangunan sudah merupakan sebuah proses yang berkesinambungan, yang bisa menopang kemajuan secara terus menerus. seperti halnya teori-teori modernisasi lainnya, didasarkan pada dikotomi masyarakat tradisional dan masyarakat modern. Titik terpenting dalam gerak kemajuan dari masyarakat yang satu ke yang lainnya adalah periode lepas landas.

Rostow juga berbicara tentang keperluan akan adanya sekelompok wiraswastawan, yakni orang-orang yang berani melakukan tindakan pembaruan, meskipun tindakan tersebut ada resikonya. Dia kemudian berbicara tentang kondisi-kondisi sosial yang melahirkan para wiraswatawan ini. Rostow menyebutkan dua kondisi sosial:

1. Adanya elite baru dalam masyarakat yang merasa diingkari haknya oleh masyarakat tradisional dimana dia hidup, untuk mendapatkan prestise dan mencapai kekuasaan melalui cara konvensional yang ada;
2. Masyarakat tradisional yang ada cukup fleksibel (atau lemah) untuk memperbolehkan warganya untuk mencari kekayaan (atau kekuasaan politik) sebagai jalan untuk menaikkan statusnya dalam masyarakat (biasanya hak ini dicapai melalui kepatuhan dan kesetiaan terhadap yang berkuasa).

Kelompok elite baru inilah yang akan menjadi tenaga pendorong untuk melakukan pembaruan. Elite baru ini merupakan kelompok orang yang frustrasi (dalam arti positif) Karena tatanan social dan politik yang ada tidak member kemungkinan untuk mengembangkan diri. Ini misalnya terjadi pada kelompok pedagang (cikal bakal dari kaum burjuasi di jaman modern) di jaman feodal, atau orang-orang Yahudi di Eropa, atau orang-orang Cina di Asia Tenggara. Karena tidak bisa memajukan diri di jalur sosial-politik, mereka bergerak di bidang ekonomi dan kemudian mendapatkan tempat terhormat, karena keberhasilannya mengumpulkan kekayaan.

Dalam membahas masalah lepas landas pun, Rostow berbicara tentang aspek-aspek non ekonomi ini. Baginya, lepas landas harus memenuhi semua dari ketiga kondisi yang saling berkaitan yakni:

1. Meningkatnya investasi di sector produktif dari 5% (atau kurang) atau lebih) dari pendapatan nasional;
2. Tumbuhnya satu atau lebih sektor industri manufaktur yang penting, dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi;
3. Adanya atau munculnya secara cepat lembaga-lembaga politik dan sosial yang bisa memanfaatkan berbagai dorongan gerak ekspansi dari sector ekonomi modern dan akibat yang mungkin terjadi dengan adanya

kekuatan-kekuatan ekonomi dari luar sebagai hasil dari lepas landas; disamping itu lembaga-lembaga ini kemudian bisa membuat pertumbuhan menjadi sebuah proses yang berkesinambungan.

Kondisi ketiga merupakan kondisi non-ekonomi yang penting. Tetapi, Rostow memang masih mengutamakan peran ekonomi dari lembaga-lembaga tersebut.

Kondisi ketiga menunjuk kepada kesanggupan yang cukup (dari lembaga-lembaga itu) untuk mengumpulkan modal dari sumber-sumber dalam negeri. Prakondisi untuk lepas landas memerlukan kesanggupan awal untuk menggerakkan tabungan dalam negeri secara produktif, dan juga menciptakan sebuah struktur yang memungkinkan tingkat tabungan yang cukup tinggi.

Yang dimaksud oleh Rostow misalnya adalah negara yang melindungi kepentingan para wiraswastawan untuk melakukan akumulasi modal. Atau memberikan iklim politik yang menguntungkan bagi para industriawan, atau orang asing untuk menanamkan modalnya. Memang, fungsi dari lembaga-lembaga non-ekonomi ini adalah untuk menunjang pertumbuhan ekonomi. Tetapi, sebagai seorang ahli ekonomi, dengan menyebutkan lembaga-lembaga non-

ekonomi ini Rostow telah membuat langkah yang sangat berarti.

Dari uraian di atas kita juga melihat bahwa pada dasarnya Rostow masih melihat masalah pembangunan sebagai masalah yang seperti diuraikan oleh model Harrod-Domar: tingkatkan tabungan dan investasi produktif setinggi mungkin. Lembaga-lembaga non-ekonomi seperti lembaga-lembaga politik dan sosial juga harus digerakan untuk mencapai tujuan ini. Kalau ini bisa dilakukan, tahap lepas landas, dan kemudian tahap konsumsi masal yang tinggi, akan segera dicapai. Tetapi, langkah pertama dari seluruh proses yang panjang ini dimulai dengan menghilangkan hambatan pada masyarakat tradisional, supaya masyarakat tersebut dapat memerdekakan diri dari nilai-nilai tradisinya, dan mulai bergerak maju. Ini jelas faktor non-ekonomi. Pendapat senada diutarakan oleh Bert F. Hoselitz dimana Negara berkembang wajib mempunyai pasokan modal besar dari perbankan, serta dukungan tenaga ahli agar menunjang pertumbuhan ekonomi.

Sebagai tambahan, untuk memecahkan persoalan keterbelakangan Negara Dunia Ketiga adalah dengan mencari tambahan modal baik dari dalam negeri (dengan mengusahakan peningkatan tabungan dalam negeri),

maupun dari luar negeri (melalui penanaman modal dan utang luar negeri). Pada konteks ini, Max Weber berpendapat bahwa:

- Peran agama sebagai faktor utama yang menyebabkan munculnya kapitalisme yang berimplikasi pada kemajuan ekonomi yang pesat di Eropa Barat;
- Salah satu cara untuk mengetahui apakah mereka akan masuk surga atau neraka adalah keberhasilan kerjanya di dunia yang sekarang ini. Kepercayaan ini membuat penganut agama protestan bekerja keras untuk meraih sukses;
- Etika Protestan yaitu cara bekerja yang keras dan sungguh-sungguh, lepas dari imbalan materialnya.

Berbeda dengan Weber, David McClelland mengungkapkan bahwa:

- Ada kepuasan batin tersendiri kalau dia berhasil menyelesaikan pekerjaannya dengan sempurna
- Adanya *n-Ach (need for achievement)* yang tinggi dalam sebuah masyarakat akan mengakibatkan pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat tersebut;
- Cara yang paling baik untuk menumbuhkan *n-Achievement* ini adalah melalui keluarga; dan sulit sekali untuk menumbuhkannya dalam skala yang besar.

BAB IV

PERAN NEGARA DAN MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN

A. Definisi

Berbeda dengan kaum klasik dan neoklasik itu adalah pandangan yang melihat peran pemerintah sebagai suatu keniscayaan. Tanpa campur tangan pemerintah, akan terjadi persaingan bebas yang merugikan kelompok ekonomi lemah. Akibatnya, yang terjadi bukan kebebasan pasar tetapi restriksi pasar dalam bentuk monopoli yang dikuasai golongan ekonomi kuat. J.M. Keynes yang dipandang justru menganggap kebebasan pasar, tanpa ada campur tangan pemerintah, tidak akan mampu melakukan alokasi sumberdaya dan *output* secara optimal (*full employment of outputs*).

Karena itu Keynes memandang perlu adanya peran pemerintah, antara lain dalam bentuk kebijakan anggaran untuk mengatasi pengangguran yang sekaligus juga meningkatkan daya beli dan mendorong adanya kegiatan bisnis. Sejalan Keynes, Pigou juga melihat bahwa kebebasan pasar yang berdasarkan pada maximum keuntungan individu tidak mampu

menciptakan alokasi sumberdaya yang optimal bagi kepentingan umum.

B. Pembangunan di Dunia Ketiga

Yang dimaksud dengan teori pembangunan dunia ketiga adalah teori-teori pembangunan yang berusaha menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh negara-negara miskin atau negara-negara sedang yang sedang berkembang dalam sebuah dunia yang didominasi oleh kekuatan ekonomi, ilmu pengetahuan dan militer negara-negara adikuasa atau negara-negara industri maju.

Masalah-masalah yang dimaksud yakni bagaimana mempertahankan hidup atau meletakkan dasar-dasar ekonominya agar dapat bersaing di pasar internasional. Untuk mengukur pembangunan atau pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat dilihat dari:

1. Kekayaan rata-rata yakni produktifitas masyarakat atau produktifitas negara tersebut melalui produk nasional bruto dan *produk domestic bruto*.
2. Pemerataan: tidak saja kekayaan atau produktifitas bangsa yang dilihat, tetapi juga pemerataan kekayaan dimana tidak terjadi ketimpangan yang besar antara pendapatan golongan termiskin, menengah dan golongan terkaya. Bangsa yang berhasil dalam pembangunan adalah bangsa yang tinggi

produktifitasnya serta penduduknya relatif makmur dan sejahtera secara merata.

3. Kualitas kehidupan dengan tolok ukur PQLI (*Physical Quality of Life Index*) yakni: rata-rata harapan hidup sesudah umur satu tahun, rata-rata jumlah kematian bayi, dan rata-rata presentasi buta dan melek huruf.
4. Kerusakan lingkungan.
5. Kejadian sosial dan kesinambungan.

Ada tiga hal yang perlu kita pahami, yaitu:

- a. Memiliki perbedaan dan persamaan dengan teori pembangunan bagi negara-negara adikuasa, karena persoalan yang dihadapinya berlainan.
- b. Bagi negara-negara dunia ketiga, persoalannya adalah bagaimana bertahan hidup atau bagaimana meletakkan dasar-dasar ekonominya supaya bis bersaing di pasar internasional.
- c. Bagi negara-negara adikuasa persolannya adalah bagaimana melakukan ekspansi lebih lanjut bagi kehidupan ekonominya yang sudah mapan.

Ada 3 kelompok teori yang dibahas:

- a. Teori modernisasi. Menekankan faktor manusia dan nilai-nilai budanya sebagai pokok persoalan dalam pembangunan.

Teori modernisasi merupakan kelompok teori yang dominan dalam mengkaji masalah pembangunan di Indonesia.

- b. Teori ketergantungan. Teori ini merupakan reaksi terhadap teori modernisasi. Teori ini mula-mula tumbuh di kalangan para ahli ilmu sosial di Amerika Latin kemudian meluas sampai ke Amerika Serikat dan Eropa dan Asia. Teori ini dipengaruhi oleh metoda analisis Marxis. Teori yang merupakan reaksi terhadap teori ketergantungan. Teori ini sering disebut sebagai teori pasca ketergantungan. Di dalamnya ada teori sistem dunia, teori artikulasi dan sebagainya.

C. Peran Negara/Pemerintah dalam Pembangunan

Peran negara/pemerintah dalam pembangunan telah menjadi objek pembahasan yang menarik sejak lama. Aliran Klasik, yang menganut kebebasan pasar menganggap campur tangan pemerintah sebagai sesuatu yang menghambat dan mengganggu bekerjanya kekuatan-kekuatan objektif dari pasar yang disebut sebagai mekanisme pasar. Penerusnya para penganut aliran neoklasik bahkan menuduh bahwa campur tangan pemerintah dapat menghambat kebebasan individu (*individual freedom*) yang merupakan fondasi dari sistem demokrasi. Campur tangan pemerintah dalam arti berfungsinya

birokrasi melahirkan regulasi, proteksi dan subsidi import yang merugikan para konsumen. Tiga hal yang terakhir ini dianggap kelompok neoklasik sebagai perilaku tidak baik yang harus dihindarkan.

Berbeda dengan kaum klasik dan neoklasik itu adalah pandangan yang melihat peran pemerintah sebagai suatu keniscayaan. Tanpa campur tangan pemerintah, akan terjadi persaingan bebas yang merugikan kelompok ekonomi lemah. Akibatnya, yang terjadi bukan kebebasan pasar tetapi restriksi pasar dalam bentuk monopoli yang dikuasai golongan ekonomi kuat. J.M. Keynes yang dipandang justru menganggap kebebasan pasar, tanpa ada campur tangan pemerintah, tidak akan mampu melakukan alokasi sumberdaya dan output secara optimal (*full employment of outputs*). Karena itu Keynes memandang perlu adanya peran pemerintah, antara lain dalam bentuk kebijakan anggaran untuk mengatasi pengangguran yang sekaligus juga meningkatkan daya beli dan mendorong adanya kegiatan bisnis.

Sejalan Keynes, Pigou juga melihat bahwa kebebasan pasar yang berdasarkan pada maximum keuntungan individu tidak mampu menciptakan alokasi sumberdaya yang optimal bagi kepentingan umum. Bagaimana dampak dari campur

tangan pemerintah dalam pembangunan terhadap organisasi dan efektivitas pembangunan akan dibahas selanjutnya.

D. Peran Masyarakat Sebagai Pelaku Pembangunan

Partisipasi masyarakat adalah ikut sertanya seluruh anggota masyarakat dalam memecahkan permasalahan-permasalahan masyarakat tersebut. Partisipasi masyarakat di bidang kesehatan berarti keikutsertaan seluruh anggota masyarakat dalam memecahkan masalah kesehatan mereka sendiri. Di dalam hal ini, masyarakat sendirilah yang aktif memikirkan, merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program-program kesehatan masyarakatnya. Institusi kesehatan hanya sekadar memotivasi dan membimbingnya (Notoatmodjo, 2007).

Mikkelsen dalam Soetomo (2006), mengatakan bahwa pembangunan pada dasarnya merupakan proses perubahan, dan salah satu bentuk perubahan yang diharapkan adalah perubahan sikap dan perilaku. Partisipasi masyarakat yang semakin meningkat baik secara kualitatif maupun kuantitatif merupakan salah satu perwujudan dari perubahan sikap dan perilaku tersebut. Ada enam jenis tafsiran mengenai partisipasi masyarakat tersebut antara lain:

- 1) Partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek atau program pembangunan tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan.
- 2) Partisipasi adalah usaha membuat masyarakat semakin peka dalam meningkatkan kemauan menerima dan kemampuan menanggapi proyek-proyek atau program-program pembangunan.
- 3) Partisipasi adalah proses yang aktif, yang mengandung arti bahwa orang atau kelompok terkait mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasannya untuk melakukan hal itu.
- 4) Partisipasi adalah penetapan dialog antara masyarakat setempat dengan para staf dalam melakukan persiapan, pelaksanaan dan monitoring proyek/program agar memperoleh informasi mengenai konteks lokal dan dampak-dampak sosial.
- 5) Partisipasi adalah keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam perubahan yang ditentukan sendiri.
- 6) Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, kehidupan dan lingkungan mereka.

Conyer dalam Soetomo (2006), mengemukakan partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat secara sukarela yang didasari oleh determinan dan kesadaran diri masyarakat itu sendiri dalam program pembangunan. Ada lima cara untuk melibatkan keikutsertaan masyarakat yaitu:

1. Survei dan konsultasi lokal untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan.
2. Memanfaatkan petugas lapangan, agar sambil melakukan tugasnya sebagai agen pembaharu juga menyerap berbagai informasi yang dibutuhkan dalam perencanaan.
3. Perencanaan yang bersifat desentralisasi agar lebih memberikan peluang yang semakin besar kepada masyarakat untuk berpartisipasi.
4. Perencanaan melalui pemerintah lokal.
5. Menggunakan strategi pembangunan komunitas (*community development*)

Menurut Slamet (2003), berdasarkan pengertian partisipasi, maka partisipasi dalam pembangunan dapat dibagi menjadi lima jenis:

1. Ikut memberi *input* proses pembangunan, menerima imbalan atas *input* tersebut dan ikut menikmati hasilnya.
2. Ikut memberi *input* dan menikmati hasilnya.
3. Ikut memberi *input* dan menerima imbalan tanpa ikut menikmati hasil pembangunan secara langsung.
4. Menikmati/memanfaatkan hasil pembangunan tanpa ikut memberi *input*.
5. Memberi *input* tanpa menerima imbalan dan tidak menerima hasilnya.

BAB V

TEORI FUNGSIONAL STRUKTURAL

Teori Fungsional-struktural adalah sesuatu yang urgen dan sangat bermanfaat dalam suatu kajian tentang analisa masalah sosial. Hal ini disebabkan karena studi struktur dan fungsi masyarakat merupakan sebuah masalah sosiologis yang telah menembus karya-karya para pelopor ilmu sosiologi dan para ahli teori kontemporer. Teori fungsionalisme struktural adalah suatu bangunan dalam ilmu sosial di abad sekarang yang paling besar pengaruhnya.

A. Perkembangan Teori Fungsional Struktural

Teori fungsionalisme struktural adalah suatu bangunan teori yang paling besar pengaruhnya dalam ilmu sosial di abad sekarang. Tokoh-tokoh yang pertama kali mencetuskan fungsional yaitu August Comte, Emile Durkheim dan Herbet Spencer. Pemikiran struktural fungsional sangat dipengaruhi oleh pemikiran biologis yaitu menganggap masyarakat sebagai organisme biologis yaitu terdiri dari organ-organ yang saling ketergantungan, ketergantungan tersebut merupakan hasil atau konsekuensi agar organisme tersebut tetap dapat bertahan hidup. Sama halnya dengan pendekatan lainnya pendekatan fungsional

struktural ini juga bertujuan untuk mencapai keteraturan sosial. Teori fungsional struktural ini awalnya berangkat dari pemikiran Emile Durkheim, dimana pemikiran Durkheim ini dipengaruhi oleh Auguste Comte dan Herbert Spencer. Comte dengan pemikirannya mengenai analogi organismik kemudian dikembangkan lagi oleh Herbert Spencer dengan membandingkan dan mencari kesamaan antara masyarakat dengan organisme, hingga akhirnya berkembang menjadi apa yang disebut dengan *requisite functionalism*, dimana ini menjadi panduan bagi analisa substantif Spencer dan penggerak analisa fungsional. Dipengaruhi oleh kedua orang ini, studi Durkheim tertanam kuat terminologi organismik tersebut. Durkheim mengungkapkan bahwa masyarakat adalah sebuah kesatuan dimana didalamnya terdapat bagian-bagian yang dibedakan. Bagian-bagian dari sistem tersebut mempunyai fungsi masing-masing yang membuat sistem menjadi seimbang. Bagian tersebut saling interdependensi satu sama lain dan fungsional, sehingga jika ada yang tidak berfungsi maka akan merusak keseimbangan sistem. Pemikiran inilah yang menjadi sumbangsih Durkheim dalam teori Parsons dan Merton mengenai struktural fungsional. Selain itu, antropologis fungsional-Malinowski dan Radcliffe Brown juga membantu membentuk berbagai perspektif fungsional modern.

Selain dari Durkheim, teori struktural fungsional ini juga dipengaruhi oleh pemikiran Max Weber. Secara umum, dua aspek dari studi Weber yang mempunyai pengaruh kuat adalah:

- a. Visi substantif mengenai tindakan sosial
- b. Strateginya dalam menganalisa struktur sosial.

Pemikiran Weber mengenai tindakan sosial ini berguna dalam perkembangan pemikiran Parsons dalam menjelaskan mengenai tindakan aktor dalam menginterpretasikan keadaan.

Hingga pertengahan abad, fungsionalisme menjadi teori yang dominan dalam perspektif sosiologi. Teori fungsional menjadi karya Talcott Parsons dan Robert Merton di bawah pengaruh tokoh-tokoh yang telah dibahas di atas. Sebagai ahli teori yang paling mencolok di zamannya, Talcott Parson menimbulkan kontroversi atas pendekatan fungsionalisme yang ia gulirkan. Parson berhasil mempertahankan fungsionalisme hingga lebih dari dua setengah abad sejak ia mempublikasikan *The Structure of Social Action* pada tahun 1937.

Dalam karyanya ini, Parson membangun teori sosiologinya melalui “analytical realism”, maksudnya adalah teori sosiologi harus menggunakan konsep-konsep tertentu yang memadai dalam melingkupi dunia luar. Konsep-konsep ini tidak bertanggung jawab pada fenomena konkrit, tapi kepada elemen-elemen didalamnya yang secara analitis dapat dipisahkan dari

elemen-elemen lainnya. Oleh karenanya, teori harus melibatkan perkembangan dari konsep-konsep yang diringkas dari kenyataan empirik, tentunya dengan segala keanekaragaman dan kebingungan-kebingungan yang menyertainya. Dengan cara ini, konsep akan mengisolasi fenomena yang melekat erat pada hubungan kompleks yang membangun realita sosial. Keunikan realism analitik Parson ini terletak pada penekanan tentang bagaimana konsep abstrak ini dipakai dalam analisis sosiologi. Sehingga yang di dapat adalah organisasi konsep dalam bentuk sistem analisa yang mencakup persoalan dunia tanpa terganggu oleh detail empiris.

Sistem tindakan diperkenalkan Parson dengan skema AGIL-nya yang terkenal. Parson meyakini bahwa terdapat empat karakteristik terjadinya suatu tindakan, yakni *Adaptation*, *Goal Atainment*, *Integration*, *Latency*. Sistem tindakan hanya akan bertahan jika memenuhi empat kriteria ini. Dalam karya berikutnya, *The Social System*, Parson melihat aktor sebagai orientasi pada situasi dalam istilah motivasi dan nilai-nilai. Terdapat berberapa macam motivasi, antara lain *kognitif*, *chatectic*, dan *evaluative*. Terdapat juga nilai-nilai yang bertanggung jawab terhadap sistem sosoial ini, antara lain nilai kognisi, apresiasi, dan moral. Parson sendiri menyebutnya sebagai *modes of orientation*. Unit tindakan oleh karena melibatkan motivasi dan orientasi nilai dan memiliki tujuan

umum sebagai konsekuensi kombinasi dari nilai dan motivasi-motivasi tersebut terhadap seorang aktor.

Karya Parson dengan alat konseptual seperti empat sistem tindakan mengarah pada tuduhan tentang teori strukturalnya yang tidak dapat menjelaskan perubahan sosial. Pada tahun 1960, studi tentang evolusi sosial menjadi jawaban atas kebuntuan Parson akan perubahan sosial dalam bangunan teori strukturalnya. Akhir dari analisis ini adalah visi metafisis yang besar oleh dunia yang telah menimpa eksistensi manusia. Analisis parson merepresentasikan suatu usaha untuk meng-kategorikan dunia ke dalam sistem, subsistem, persyaratan-persyaratan system, generalisasi media dan pertukaran menggunakan media tersebut. Analisis ini pada akhirnya lebih filosofis daripada sosiologis, yakni pada lingkup visi meta teori.

Pembahasan mengenai fungsionalisme Merton diawali pemahaman bahwa pada awalnya Merton mengkritik beberapa aspek ekstrem dan keteguhan dari fungsionalisme structural, yang mengantarkan Merton sebagai pendorong fungsionalisme kearah marxisme. Hal ini berbeda dari sang guru, Talcott Parson mengemukakan bahwa teorisi struktural fungsional sangatlah penting. Parson mendukung terciptanya teori yang besar dan mencakup seluruhnya sedangkan Parson lebih terbatas dan menengah.

Seperti penjelasan singkat sebelumnya, Merton mengkritik apa yang dilihatnya sebagai tiga postulat dasar analisis fungsional (hal ini pula seperti yang pernah dikembangkan oleh Malinowski dan Radcliffe brown. Adapun beberapa postulat tersebut antara lain: Kesatuan fungsi masyarakat, seluruh kepercayaan dan praktik sosial budaya standar bersifat fungsional bagi masyarakat secara keseluruhan maupun bagi individu dalam masyarakat. Hal ini berarti sistem sosial yang ada pasti menunjukkan tingginya level integrasi. Dari sini Merton berpendapat bahwa, hal ini tidak hanya berlaku pada masyarakat kecil tetapi generalisasi pada masyarakat yang lebih besar.

Fungsionalisme universal, seluruh bentuk dan stuktur sosial memiliki fungsi positif. Hal ini di tentang oleh Merton, bahwa dalam dunia nyata tidak seluruh struktur, adat istiadat, gagasan dan keyakinan, serta sebagainya memiliki fungsi positif. Dicontohkan pula dengan stuktur sosial dengan adat istiadat yang mengatur individu bertingkah laku kadang-kadang membuat individu tersebut depresi hingga bunuh diri. Postulat fungsional structural menjadi bertentangan.

Indispensability, aspek standard masyarakat tidak hanya memiliki fungsi positif namun juga merespresentasikan bagian bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan. Hal ini berarti fungsi secara fungsional diperlukan oleh masyarakat. Dalam hal

ini pertentangan Merton pun sama dengan parson bahwa ada berbagai alternatif struktural dan fungsional yang ada di dalam masyarakat yang tidak dapat dihindari.

Argumentasi Merton dijelaskan kembali bahwa seluruh postulat yang dijabarkan tersebut berstandar pada pernyataan non empiris yang didasarkan sistem teoritik. Merton mengungkap bahwa seharusnya postulat yang ada didasarkan empirik bukan teoritika. Sudut pandangan Merton bahwa analisis struktural fungsional memusatkan pada organisasi, kelompok, masyarakat dan kebudayaan, objek-objek yang dibedah dari struktural fungsional haruslah terpola dan berulang, merespresentasikan *unsure standard*.

Awalnya aliran fungsionalis membatasi dirinya dalam mengkaji masyarakat secara keseluruhan, namun Merton menjelaskan bahwa dapat juga diterapkan pada organisasi, institusi dan kelompok. Dalam penjelasan ini Merton memberikan pemikiran tentang *the middle range theory*. Merton mengemukakan bahwa para ahli sosiologi harus lebih maju lagi dalam peningkatan kedisiplinan dengan mengembangkan “teori-teori taraf menengah” daripada teori-teori besar. Teori taraf menengah itu didefinisikan oleh Merton sebagai: Teori yang terletak diantara hipotesa kerja yang kecil tetapi perlu, yang berkembang semakin besar selama penelitian dari hari ke hari,

dan usaha yang mencakup semuanya mengembangkan satu teori terpadu yang akan menjelaskan semua keseragaman yang diamati dalam perilaku sosial. Teori taraf menengah pada prinsipnya digunakan dalam sosiologi untuk membimbing penelitian empiris. Dia merupakan jembatan penghubung teori umum mengenai sistem sosial yang terlalu jauh dari kelompok-kelompok perilaku tertentu, organisasi, dan perubahan untuk mempertanggungjawabkan apa yang diamati, dan gambaran terinci secara teratur mengenai hal-hal tertentu yang tidak di generalisasi sama sekali. Teori sosiologi merupakan kerangka proposisi yang saling terhubung secara logis dimana kesatuan empiris bisa diperoleh.

The middle range theory adalah teori-teori yang terletak pada minor tetapi hipotesis kerja mengembangkan penelitian sehari-hari yang menyeluruh dan keseluruhan upaya sistematis yang inklusif untuk mengembangkan teori yang utuh. *The middle range theory* Merton ini memiliki berbagai pemahaman bahwa secara prinsip digunakan untuk panduan temuan-temuan empiris, merupakan lanjutan dari teori sistem sosial yang terlalu jauh dari penggolongan khusus perilaku sosial, organisasi, dan perubahan untuk mencatat apa yang di observasi dan di deskripsikan, meliputi abstraksi, tetapi ia cukup jelas dengan data yang terobservasi untuk digabungkan dengan proposisi yang memungkinkan tes empiris dan muncul dari ide yang

sangat sederhana. Dalam hal ini Merton seakan melakukan tarik dan menyambung, artinya apa yang dia kritik terhadap fungsionalis merupakan jalan yang dia tempuh untuk menyambung apa yang dia pikirkan. Atau dianalogikan, Merton mengambil bangunan teori kemudian di benturkan setelah itu dia perbaiki lagi dengan konseptual yang menurut kami sangat menarik.

Para fungsional struktural pada awalnya memusatkan pada fungsi dalam struktur dan institusi dalam masyarakat. Bagi Merton hal ini tidaklah demikian, karena dalam menganalisis hal itu, para fungsionalis awal cenderung mencampur adukan motif subjektif individu dengan fungsi struktur atau institusi. Analisis fungsi bukan motif individu. Merton sendiri mendefinisikan fungsi sebagai konsekuensi-konsekuensi yang didasari dan yang menciptakan adaptasi atau penyesuaian, karena selalu ada konsekuensi positif. Tetapi, Merton menambahkan konsekuensi dalam fakta sosial yang ada tidaklah positif tetapi ada negatifnya. Dari sini Merton mengembangkan gagasan akan disfungsi. Ketika struktur dan fungsi dapat memberikan kontribusi pada terpeliharanya sistem sosial tetapi dapat mengandung konsekuensi negatif pada bagian lain. Hal ini dapat dicontohkan, struktur masyarakat patriarki memberikan kontribusi positif bagi kaum laki-laki untuk memegang wewenang dalam keputusan kemasyarakatan, tetapi hal ini

mengandung konsekuensi negatif bagi kaum perempuan karena aspirasi mereka dalam keputusan terbatas. Gagasan non fungsi pun, dilontarkan oleh Merton. Merton mengemukakan nonfungsi sebagai konsekuensi tidak relevan bagi sistem tersebut. Ada konsekuensi positif dimasa lalu tapi tidak di masa sekarang. Tidaklah dapat ditentukan manakah yang lebih penting fungsi-fungsi positif atau disfungsi. Untuk itu Merton menambahkan gagasan melalui keseimbangan mapan dan tingkatan analisis fungsional.

Dalam penjelasan lebih lanjut, Merton mengemukakan mengenai fungsi *manifest* dan fungsi laten. Fungsi *manifest* adalah fungsi yang dikehendaki, laten adalah yang tidak dikehendaki. Maka dalam struktur yang ada, hal-hal yang tidak relevan juga disfungsi laten dipengaruhi secara fungsional dan disfungsional. Merton menunjukkan bahwa suatu struktur disfungsional akan selalu ada. Dalam teori ini Merton dikritik oleh Colim Campbell, bahwa pembedaan yang dilakukan Merton dalam fungsi *manifest* dan laten, menunjukkan penjelasan Merton yang begitu kabur dengan berbagai cara. Hal ini Merton tidak secara tepat mengintegrasikan teori tindakan dengan fungsionalisme. Hal ini berimplikasi pada ketidakpasan antara intersionalitas dengan *fungsionalisme structural*. Dalam hal ini pun Merton terlalu naif dalam mengedepankan idealismenya tentang struktur dan dengan beraninya dia mengemukakan dia

beraliran fungsionalis, tapi dia pun mengkritik akar pemikiran yang mendahuluinya. Tetapi, lebih jauh dari itu konsepnya mengenai fungsi *manifest* dan laten telah membuka kekauan bahwa fungsi selalu berada dalam daftar menu struktur. Merton pun mengungkap bahwa tidak semua struktur sosial tidak dapat diubah oleh sistem sosial. Tetapi beberapa sistem sosial dapat dihapuskan. Dengan mengakui bahwa struktur sosial dapat membuka jalan bagi perubahan sosial.

Analisis Merton tentang hubungan antara kebudayaan, struktur, dan anomie. Budaya didefinisikan sebagai rangkaian nilai normatif teratur yang mengendalikan perilaku yang sama untuk seluruh anggota masyarakat. Struktur sosial didefinisikan sebagai serangkaian hubungan sosial teratur dan mempengaruhi anggota masyarakat atau kelompok tertentu dengan cara lain. Anomie terjadi jika ketika terdapat disjungsi ketat antara norma-norma dan tujuan budaya yang terstruktur secara sosial dengan anggota kelompok untuk bertindak menurut norma dan tujuan tersebut. Posisi mereka dalam struktur terdapat beberapa orang tidak mampu bertindak menurut norma-norma normatif. Kebudayaan menghendaki adanya beberapa jenis perilaku yang dicegah oleh struktur sosial. Merton menghubungkan anomie dengan penyimpangan dan dengan demikian disjungsi antara kebudayaan dengan struktur akan melahirkan konsekuensi disfungsional yakni penyimpangan dalam masyarakat. Anomie

Merton memang sikap kritis tentang stratifikasi sosial, hal ini mengindikasikan bahwa teori struktural fungsionalisme ini harus lebih kritis dengan stratifikasi sosialnya. Bahwa struktur masyarakat yang selalu berstratifikasi dan masing-masing memiliki fungsi yang selama ini diyakini para fungsionalis, menurut dapat mengindikasikan disfungsi dan anomie. Dalam hal ini kami setuju dengan Merton, dalam *sensory experiences*, dimana ada keteraturan maka harus siap dengan ketidak-teraturan, dalam struktur yang teratur, kedinamisan terus berjalan tidak pada status didalamnya tapi kaitan dalam peran. Anomie atau disfungsi cenderung hadir dipahami ketika peran dalam struktur berdasarkan status tidak dijalankan akibat berbagai faktor. Apapun alasannya anomie dalam struktur apalagi yang kaku akan cenderung lebih besar. Dari sini, Merton tidak berhenti dengan deskripsi tentang struktur, akan tetapi terus membawa kepribadian sebagai produk organisasi struktur tersebut. Pengaruh lembaga atau struktur terhadap perilaku seseorang adalah merupakan tema yang merasuk ke dalam karya Merton, lalu tema ini selalu diilustrasikan oleh Merton yaitu *the Self Fulfilling Prophecy* serta dalam buku *Social Structure and Anomie*. Di sini Merton berusaha menunjukkan bagaimana struktur sosial memberikan tekanan yang jelas pada orang-orang tertentu yang ada dalam masyarakat sehingga mereka lebih, menunjukkan kelakuan non konformis ketimbang konformis.

Menurut Merton, anomie tidak akan muncul sejauh masyarakat menyediakan sarana kelembagaan untuk mencapai tujuan-tujuan kultur tersebut.

Dari berbagai penjabaran yang ada Pemahaman Merton membawa pada tantangan untuk mengkonfirmasi segala pemikiran yang telah ada. Hal ini terbukti dengan munculnya fungsionalisme gaya baru yang lebih jauh berbeda dengan apa yang pemikiran Merton. Inilah bukti kedinamisan ilmu pengetahuan, tak pelak dalam fungsionalisme struktural.

B. Paradigma AGIL (*Talcott Parsons*)

Talcott Parsons (1902-1979) mensistemasi rumusan-rumusan terdahulu tentang pendekatan fungsionalis terhadap sosiologi. Parsons mengawali dari masalah aturan yang dikemukakan filsuf terdahulu Thomas Hobbes (1585-1679). Hobbes mengatakan bahwa manusia mungkin secara alamiah saling mencakar satu sama lain kecuali jika dikontrol dan dikekang secara sosial.

Berpijak dari pandangan itu, Parsons mengembangkan Teori Sistem (1951) yang menguraikan panjang lebar tentang apa yang disebut prasyarat fungsional bagi keberlangsungan sebuah masyarakat.

Paradigma AGIL adalah salah satu teori Sosiologi yang dikemukakan oleh ahli sosiologi Amerika, Talcott Parsons pada sekitar tahun 1950. Teori ini adalah lukisan abstraksi yang sistematis mengenai keperluan sosial (kebutuhan fungsional) tertentu, yang mana setiap masyarakat harus memeliharanya untuk memungkinkan pemeliharaan kehidupan sosial yang stabil. Teori AGIL adalah sebagian teori sosial yang dipaparkan oleh Parson mengenai struktur fungsional, diuraikan dalam bukunya *The Social System*, yang bertujuan untuk membuat persatuan pada keseluruhan system sosial. Teori Parsons dan Paradigma AGIL sebagai elemen utamanya mendominasi teori sosiologi dari tahun 1950 hingga 1970.

AGIL merupakan akronim dari *Adaptation*, *Goal Attainment*, *Integration*, dan *Latency* atau *latent pattern-maintenance*, meskipun demikian tidak terdapat skala prioritas dalam pengurutannya.

Prasyarat tersebut adalah A-G-I-L:

- a) *Adaptation* (adaptasi): bagaimana sebuah sistem beradaptasi dengan lingkungannya. Konsep ini dikaitkan dengan faktor ekonomi.
- b) *Goal Attainment* (pencapaian tujuan): menentukan tujuan yang kepadanya anggota masyarakat diarahkan. Konsep ini dikaitkan dengan faktor politik.

- c) *Integration* (integrasi): kebutuhan untuk mempertahankan keterpaduan sosial. Konsep ini dikaitkan dengan faktor sosial.
- d) *Laten-Pattern Maintenance* (pemeliharaan pola): sosialisasi atau reproduksi masyarakat agar nilai-nilai tetap terpelihara. Konsep ini dikaitkan dengan faktor budaya.

C. Teori Fungsional Struktural dalam Kehidupan Sosial

Talcott Parsons dalam menguraikan teori ini menjadi sub-sistem yang berkaitan menjelaskan bahwa diantara hubungan fungsional-struktural cenderung memiliki empat tekanan yang berbeda dan terorganisir secara simbolis:

- a. Pencarian pemuasan psikis.
- b. Kepentingan dalam menguraikan pengertian-pengertian simbolis.
- c. Kebutuhan untuk beradaptasi dengan lingkungan organisasi, dan
- d. Usaha untuk berhubungan dengan anggota-anggota makhluk manusia lainnya.

Sebaliknya masing-masing sub-sistem itu, harus memiliki empat prasyarat fungsional yang harus mereka adakan sehingga bias diklasifikasikan sebagai suatu sistem. Parsons menekankan saling ketergantungan masing-masing sistem itu

ketika dia menyatakan: “secara konkrit, setiap system empiris mencakup keseluruhan, dengan demikian tidak ada individu konkrit yang tidak merupakan sebuah organisme, kepribadian, anggota dan sistem sosial, dan peserta dalam sistem kultural.

Walaupun fungsionalisme struktural memiliki banyak pemuka yang tidak selalu harus merupakan ahli-ahli pemikir teori, akan tetapi paham ini benar-benar berpendapat bahwa sosiologi adalah merupakan suatu studi tentang struktur-struktur sosial sebagai unit-unit yang terbentuk atas bagian-bagian yang saling tergantung.

Fungsionalisme struktural sering menggunakan konsep sistem ketika membahas struktur atau lembaga sosial. Sistem ialah organisasi dari keseluruhan bagian-bagian yang saling tergantung. Ilustrasinya bisa dilihat dari sistem listrik, sistem pernapasan, atau sistem sosial. Yang mengartikan bahwa fungsionalisme struktural terdiri dari bagian yang sesuai, rapi, teratur, dan saling bergantung. Seperti layaknya sebuah sistem, maka struktur yang terdapat di masyarakat akan memiliki kemungkinan untuk selalu dapat berubah. Karena sistem cenderung ke arah keseimbangan maka perubahan tersebut selalu merupakan proses yang terjadi secara perlahan hingga mencapai posisi yang seimbang dan hal itu akan terus berjalan seiring dengan perkembangan kehidupan manusia.

BAB VI

TEORI KETERGANTUNGAN

A. Definisi

Teori ketergantungan adalah sebagai antitesis teori modernisasi yakni menekankan pada aspek keterbelakangan sebagai produk dari pola hubungan ketergantungan. Kedua kubu tersebut mendominasi ‘proyek besar’ pembangunan hingga akhir tahun 1980-an, ketika studi pembangunan mencapai ‘jalan buntu’. Kedua kubu teoritis tersebut dianggap gagal. Di satu sisi, realitas yang ada di negara-negara dunia ketiga sebagai obyek pembangunan tetap ditandai oleh berbagai indikator keterbelakangan, di sisi lain muncul fenomena negara-negara industri baru sebagai kisah sukses.

B. Sejarah Teori Ketergantungan

Awal mula Teori Ketergantungan (*Dependency Theory*) dikembangkan pada akhir tahun 1950-an oleh Raul Presbich (Direktur *Economic Commission for Latin America, ECLA*). Dalam hal ini Raul Presbich dan rekannya bimbang terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara maju yang tumbuh pesat, namun tidak serta merta memberikan perkembangan yang

sama kepada pertumbuhan ekonomi di negara-negara miskin. Bahkan dalam kajiannya mereka mendapati aktivitas ekonomi di negara-negara yang lebih kaya sering kali membawa kepada masalah-masalah ekonomi di negara-negara miskin. Hal ini oleh para teori neo-klasik tidak dapat diprediksi sebelumnya dan dianggap bertentangan, oleh karena teori neo-klasik mengandaikan pertumbuhan ekonomi akan memberi manfaat kepada semua negara walaupun manfaatnya tidak selalui dibagi secara sama rata.

Kajian Prebisch mengenai fenomena ketergantungan ialah negara-negara miskin mengekspor komoditi ke negara-negara kaya yang kemudian menjadikan barang komoditi tersebut menjadi barang siap (*manufactured*) dan kemudian menjual kembali barang tersebut kepada negara-negara miskin. Nilai tambah yang ada oleh karena barang tersebut menjadi barang yang siap tentunya menimbulkan biaya yang lebih tinggi dibandingkan barang yang belum siap. Oleh karena itulah, mengapa negara-negara miskin senantiasa tidak memperoleh pendapatan yang cukup dengan ekspor mereka karena terpaksa membayar lebih besar untuk mengimpor barang yang lebih siap dari negara-negara maju.

Prebisch kemudian mengeluarkan suatu solusi terhadap kenyataan yang ada, yaitu negara-negara miskin sepatutnya

melakukan program dengan menggantikan atau mencari pengganti barang yang selama ini mereka impor sehingga mereka tidak perlu lagi membeli barang siap dari negara-negara kaya. Negara-negara miskin juga perlu menjual produk-produk utama mereka ke pasaran dunia, akan tetapi cadangan devisa (mata uang asing) yang mereka peroleh dari penjualan produk utama tersebut jangan digunakan untuk membeli barang manufaktur dari luar.

Namun demikian, paling tidak ada tiga hal pokok yang membuat kebijakan seperti tersebut di atas sulit untuk dilakukan yaitu:

- 1) Pasar domestik negara-negara miskin tidak cukup besar guna mendukung skala ekonomi yang digunakan negara-negara kaya untuk terus membuat harga yang lebih rendah.
- 2) Kemauan politik (*political will*) negara-negara miskin terhadap transformasi (perubahan) dari sekadar menjadi produser komoditi barang primer sesuatu yang mungkin atau diinginkan.
- 3) Sejauh mana negara-negara miskin sebenarnya memiliki kontrol terhadap produk utama mereka, khususnya bagi penjualan barang tersebut di luar negeri.

Pada tahap ini dikatakan bahwa teori ketergantungan dapat di lihat untuk menjelaskan penyebab mengapa negara-negara miskin terus menjadi miskin. Adapun pendekatan tradisional neo-klasik tidak pernah melihat isu kemiskinan ini, sebaliknya mengatakan negara-negara miskin terlalu lambat untuk mengubah perekonomian mereka dengan mempelajari teknik-teknik ekonomi modern yang dapat membuat kemiskinan mereka menjadi berkurang (terhapus). Sedangkan penganut paham teori Marxis melihat kemiskinan yang berlanjut ini sebagai eksploitasi dari kapitalis.

Lebih lanjut dari kedua pemikiran di atas, muncullah satu pemikiran baru yang dikenal dengan Teori Sistem Dunia (*World System Theory*). Pendekatan ini mencoba menjelaskan bahwa kemiskinan adalah konsekuensi langsung dari evolusi ekonomi politik internasional kedalam pembagian yang kaku soal buruh yang mana menguntungkan pihak yang kaya dan merugikan yang miskin.

Secara umum dapat dikatakan bahwa tidak ada teori tunggal untuk mempelajari teori ketergantungan, oleh karena perdebatan di antara teoritis, seperti Raul Presbich (mewakili pembaharu Liberal), Andre Gunder Frank (mewakili Marxist), dan Immanuel Wallerstein (mewakili Sistem Dunia) sangatlah kuat dan menarik untuk dikaji lebih jauh.

Secara umum ketergantungan didefinisikan sebagai suatu penjelasan mengenai pembangunan ekonomi negara dari pengaruh luar -politik, ekonomi dan kebudayaan- terhadap kebijakan pembangunan nasional.(Osvaldo Sunkel, “*National Development Policy and External Dependence in Latin America*,” *The Journal of Development Studies*, Vol. 6, no. 1, October 1969, p. 23).

Sedangkan Theotonio Dos Santos menekankan pada dimensi sejarah untuk menjelaskan adanya hubungan ketergantungan, yaitu:

[Dependency is]...an historical condition which shapes a certain structure of the world economy such that it favors some countries to the detriment of others and limits the development possibilities of the subordinate economics...a situation in which the economy of a certain group of countries is conditioned by the development and expansion of another economy, to which their own is subjected. (Theotonio Dos Santos, “The Structure of Dependence,” in K.T. Fann and Donald C. Hodges, eds., Readings in U.S. Imperialism. Boston: Porter Sargent, 1971, p. 226)

Makna yang dapat ditangkap dari pernyataan Dos Santos ialah bahwa keterbelakangan atau ketergantungan ekonomi Negara Dunia Ketiga bukan disebabkan oleh tidak terintegrasinya ke dalam tata ekonomi kapitalisme, tetapi monopoli modal asing, pembiayaan pembangunan dengan

modal asing, serta penggunaan teknologi maju pada tingkat internasional dan nasional mampu mencapai posisi menguntungkan dalam interaksinya dengan negara maju, yang pada gilirannya menjadikan Negara Dunia Ketiga mereproduksi keterbelakangan, kesengsaraan, dan marginalisasi sosial di dalam batas kewilayahannya.

Dalam hal ini tanpa negara-negara kaya, negara-negara miskin dianggap tidak mampu untuk meningkatkan taraf kehidupannya. Karenanya negara-negara kaya secara aktif terus melakukan dominasi terhadap negara miskin yang dilakukan di pelbagai sektor, seperti ekonomi, media, politik, perbankan dan keuangan, pendidikan, dan semua aspek pembangunan sumber manusia.

Walaupun tidak ada teori tunggal yang dapat menjelaskan teori ketergantungan, namun terdapat tiga ciri persamaan atas definisi yang disepakati oleh para ahli teori ketergantungan. *Pertama*, ketergantungan membentuk sistem internasional yang terdiri dari dua negara yang digambarkan sebagai dominan atau tergantung, pusat atau periferi atau metropolitan/satelit. Negara-negara dominan adalah negara maju yang mempunyai kemajuan industri dan tergabung dalam Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD). Sedangkan negara-negara tergantung adalah Amerika Latin,

Asia dan Afrika yang memiliki pendapatan per kapita yang rendah serta bergantung sepenuhnya kepada ekspor satu jenis komoditi untuk memperoleh devisa (*foreign exchange*).

Kedua, memiliki asumsi yang sama bahwa adanya kekuatan (dorongan) dari luar merupakan satu-satunya aktivitas ekonomi yang penting di dalam negara-negara yang bergantung. Kekuatan luar ini termasuklah Perusahaan Multi National (*MNC's*) *MNC*, pasar komoditi internasional, bantuan luar negeri, komunikasi dan berbagai bentuk lainnya yang oleh negara-negara maju digunakan untuk kepentingan ekonomi mereka di luar negeri.

Ketiga, pengertian ketergantungan menunjukkan bahwa hubungan antara negara yang mendominasi dan yang bergantung adalah dinamis, karena interaksi antara dua negara bukan hanya untuk saling menguatkan, tetapi juga untuk meningkatkan pola/corak yang tidak merata dalam pembagian ekonomi.

Seperti dinyatakan di atas, bahwa teori ketergantungan pertama kali dikemukakan oleh Prebisch dan dikemukakan kembali oleh ahli teori Marxis, Andre Gunder Frank dan diperlunak oleh Immanuel Wallerstein melalui teori sistem dunia. Teori ketergantungan menjadi populer pada 1960-an dan 1970-an sebagai kritik terhadap ahli teori pembangunan populer

yang dilihat gagal untuk menjelaskan isu kemiskinan yang semakin meningkat di sebagian besar dunia.

Konsep *underdevelopment* yang dikemukakan oleh Gunder Frank merujuk kepada satu situasi yang secara fundamental berbeda dari *undevelopment*. *Undevelopment* merujuk kepada keadaan yang mana sumber (di suatu negara) tidak digunakan. Sebagai contoh, penjajah Eropa melihat benua Amerika Utara sebagai kawasan yang tidak maju karena tanahnya tidak digunakan dalam skala yang konsisten dengan potensinya. Adapun *underdevelopment* merujuk kepada situasi yang mana sumber-sumber secara aktif digunakan, tetapi digunakan melalui cara yang hanya menguntungkan negara-negara dominan dan bukannya negara-negara miskin yang merupakan pemilik dari sumber-sumber tersebut. Oleh karena itu, negara-negara miskin bukan tertinggal bila dibandingkan negara-negara kaya dan mereka miskin bukan karena mengabaikan aspek transformasi ilmu pengetahuan, tetapi kemiskinan lebih dikarenakan dipaksa memasuki sistem ekonomi internasional.

Secara ringkas, teori ketergantungan mencoba untuk menjelaskan situasi negara-negara yang keterbelakangan (*underdeveloped*) dengan menganalisis pola-pola interaksi di berbagai negara dan dengan menjelaskan bahwa ketidak

merataan di berbagai negara adalah bagian dari adanya interaksi tersebut.

Pada intinya apa yang dikemukakan oleh Andre Gunder Frank dengan teori ketergantungannya (1980) menegaskan bahwa *underdevelopment* adalah produk kapitalisme dengan mengkaitkan kapitalisme kepada sistem dunia yang saling berkaitan. Melalui monopoli dan eksploitasi bahwa “mewujudnya keterbelakangan” (*development of underdevelopment*) adalah proses yang sedang berjalan di Amerika Latin dan masih belum berubah sejak penaklukan Spanyol dan Portugis pada abad ke-16. Lebih lanjut Gunder Frank berargumen bahwa ekonomi kapitalis dunia telah menembus Amerika Latin dengan begitu mendalam sehingga tidak ada bagian benua tersebut yang tidak “terjajah”. Ia memberikan contoh sektor pertanian di Brazil yang telah berubah menjadi industri untuk ekspor.

Gunder Frank juga merumuskan apa yang dikenal dengan struktur model satelit-metroplis (*a metropolis-satellite model*) untuk menjelaskan bagaimana mekanisme ketergantungan dan keterbelakangan Negara-negara Dunia Ketiga mewujud. Hubungan satelit-metroplis pertama kali lahir di masa kolonial, ketika penjajah membangun kota-kota di Negara Dunia Ketiga dengan maksud untuk memfasilitasi proses pengambilan surplus ekonomi untuk negara Barat.

Hubungan metropolis-satelit tidak hanya pada tingkat hubungan internasional saja, tetapi juga berlaku untuk memahami hubungan regional dan lokal di dalam Negara Dunia Ketiga. Keseluruhan rangkaian hubungan metropolis-satelit ini dibangun semata hanya untuk melakukan pengambilan surplus ekonomi (bahan mentah, tambang, dagangan, laba, dsbnya) dari kota di pedesaan Dunia Ketiga ke ibukota daerah yang lebih besar, ke kota propinsi, dan selanjutnya ibukota nasional, dan yang terakhir ke kota-kota di negara Barat. Oleh karena itulah bagi Gunder Frank proses pengambilan surplus ekonomi secara nasional dan global serta terarah inilah yang menyebabkan keterbelakangan di Negara Dunia Ketiga.

Tidak hanya itu, Gunder Frank juga melihat rangkaian hubungan metropolis-satelit ini telah terbentuk sejak abad ke-16 dan walaupun ada perubahan hanya dari segi bentuk eksploitasi dan penguasaan terhadap negara satelit. Olehnya hal ini dinamakan sebagai satu prinsip kesinambungan di dalam perubahan atau "continuity in change". Namun demikian, pada teori Gunder Frank ini ada tiga komponen utama yang harus diperhatikan, yaitu modal asing, pemerintah lokal di negara-negara satelit, dan kaum borjuis. Berdasarkan tiga komponen utama ini, ciri-ciri dari perkembangan kapitalisme satelit adalah; a) kehidupan ekonomi yang tergantung, b) terjadinya kerjasama antara modal asing dan kelas-kelas yang berkuasa di negara-

negara satelit, yaitu pejabat pemerintah, tuan tanah dan pedagang, dan c) ketimpangan antara yang kaya dan miskin.

Dengan demikian pertumbuhan ekonomi yang terjadi di negara-negara satelit hanya akan menguntungkan kepentingan modal asing dan kepentingan pribadi dari kaum borjuasi lokal. Keuntungan ini tidak akan menetes ke bawah, seperti yang diperkirakan oleh teori *trickle down effect* (teori penetes ke bawah). Pada akhirnya Gunder Frank menuju pada suatu kesimpulan bahwa keterbelakangan hanya bisa diatasi melalui revolusi, yakni revolusi yang melahirkan sistem sosialis, tanpa harus melalui pentahapan revolusi (revolusi borjuis dulu yang akan melahirkan masyarakat kapitalis, lalu melakukan revolusi sosialis).

C. Kritik Terhadap Teori Ketergantungan

Sejak tahun 1970-an, teori dependensi klasik telah demikian banyak menerima kritik. Pada dasarnya kritik yang mereka ajukan mendasarkan diri pada ketidakpuasan mereka terhadap metode kajian, konsep, dan sekaligus implikasi kebijaksanaan yang selama ini dimiliki oleh teori dependensi klasik.

1) Metode pengkajian

Teori dependensi menuduh ajaran teori modernisasi tidak hanya sekedar pola pikir yang memberikan pembenaran ilmiah dari ideologi negara-negara barat untuk mengeksploitasi negara dunia ketiga. Dalam menanggapi kritik ini, teori modernisasi membalas dengan tidak kalah garangnya, dengan menunjuk bahwa teori dependensi hanya merupakan alat propaganda politik dari ideologi revolusioner Marxisme. Baginya, teori dependensi bukan merupakan karya ilmiah, melainkan lebih merupakan pamflet politik.

2) Kategori teoritis

Teori dependensi menyatakan, bahwa situasi ketergantungan yang terjadi di Dunia Ketiga lahir sebagai akibat desakan faktor eksternal. Disinilah para penganut pola pikir neo-Marxisme mengarahkan kritiknya. Mereka menuduh, bahwa teori dependensi secara berlebihan menekankan pentingnya pengaruh faktor eksternal, dengan hampir melupakan sama sekali dinamika internal, seperti misalnya peranan kelas sosial dan negara.

3) Implikasi kebijaksanaan

Sejak dari awal penjelasannya, teori dependensi telah secara tegas dan detail menguraikan akibat buruk dari kolonialisme

dan pembagian kerja internasional. Teori ini berpendapat, selama hubungan pertukaran yang tidak berimbang ini tetap bertahan sebagai landasan hubungan internasional, maka ketergantungan negara dunia ketiga tetap tak terselesaikan. Oleh karena itu, teori dependensi mengajukan usulan yang radikal untuk mengubah situasi ketimpangan ini, yakni dengan revolusi sosialis.

BAB VII

TEORI PASCA KETERGANTUNGAN

A. Teori Sistem Dunia

Teori sistem dunia yang dikemukakan oleh Immanuel Wallerstein. Hal ini dikarenakan bahwa dalam suatu sistem sosial perlu dilihat bagian-bagian secara menyeluruh dan keberadaan negara-negara dalam dunia internasional tidak boleh dikaji secara tersendiri karena ia bukan satu sistem yang tertutup. Teori ini berkeyakinan bahwa tak ada negara yang dapat melepaskan diri dari ekonomi kapitalis yang mendunia. Wallerstein menyatakan sistem dunia modern adalah sistem ekonomi kapitalis.

Menurut Wallerstein, sistem dunia kapitalis dibagi ke dalam tiga jenis, yaitu:

1. Negara Core atau pusat, yakni negara yang mengambil keuntungan paling banyak, karena kelompok ini dapat memanipulasikan sistem dunia sampai batas-batas tertentu.
2. Negara semi-periferi atau setengah pinggiran, yakni negara yang mengambil keuntungan dari negara-negara pinggiran yang merupakan pihak yang paling dieksploitir.
3. Negara periferi atau pinggiran.

Menurut Wallerstein negara-negara dapat naik atau turun kelas, misalnya dari negara pusat menjadi negara setengah pinggiran dan kemudian menjadi negara pinggiran, dan sebaliknya. Naik dan turun kelasnya negara ini ditentukan oleh dinamika sistem dunia. Pernah suatu saat Inggris, Belanda, dan Perancis adalah negara pusat yang berperan dominan dalam sistem dunia, namun kemudian Amerika Serikat muncul menjadi negara terkuat (pusat) seiring hancurnya negara-negara Eropa dalam Perang Dunia II.

Wallerstein merumuskan tiga strategi bagi terjadinya proses kenaikan kelas, yaitu:

- 1) Kenaikan kelas terjadi dengan merebut kesempatan yang datang. Sebagai misal negara pinggiran tidak lagi dapat mengimpor barang-barang industri oleh karena mahal sedangkan komoditi primer mereka murah sekali, maka negara pinggiran mengambil tindakan yang berani untuk melakukan industrialisasi substitusi impor. Dengan ini ada kemungkinan negara dapat naik kelas.
- 2) Kenaikan kelas terjadi melalui undangan. Hal ini terjadi karena perusahaan-perusahaan industri raksasa di negara-negara pusat perlu melakukan ekspansi ke luar dan kemudian lahir apa yang disebut dengan MNC. Akibat dari perkembangan ini, maka muncullah industri-industri di

negara-negara pinggiran yang diundang oleh oleh perusahaan-perusahaan MNC untuk bekerjasama.

- 3) Kenaikan kelas terjadi karena negara menjalankan kebijakan untuk memandirikan negaranya. Sebagai misal saat ini dilakukan oleh Peru dan Chile yang dengan berani melepaskan dirinya dari eksploitasi negara-negara yang lebih maju dengan cara menasionalisasikan perusahaan-perusahaan asing. Namun demikian, semuanya ini tergantung pada kondisi sistem dunia yang ada, apakah pada saat negara tersebut mencoba memandirikan dirinya, peluang dari sistem dunia memang ada. Jika tidak, mungkin dapat saja gagal.

B. Teori Liberal

Teori liberal pada dasarnya tidak banyak dipengaruhi oleh teori ketergantungan, teori liberal tetap berjalan seperti sebelumnya yakni mengikuti asumsi-asumsi bahwa modal dan investasi adalah masalah utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

Kritik terhadap teori liberal pada umumnya berkisar pada ketajaman definisi dari teori ketergantungan. Definisi yang ada dianggap terlalu kabur, sulit dijadikan sesuatu yang operasional. Tanpa kejelasan dan ketajaman konsep-konsep dasarnya, teori

ketergantungan lebih merupakan sebuah retorika belaka. Agar konsep ketergantungan dapat di pakai untuk menyusun teori, maka ada dua kriteria yang harus dipenuhinya, yaitu:

- a. Gejala ketergantungan ini harus hanya ada di negara-negara yang ekonominya mengalami ketergantungan dan tidak di negara yang tidak tergantung dengan negara lain.
- b. Gejala ini mempengaruhi perkembangan dan pola pembangunan di negara-negara yang tergantung.

Dari penelitiannya terhadap aspek ekonomi dan sosiopolitik dari gejala ketergantungan, Teori Liberal melihat bahwa gejala ini juga terdapat di negara-negara yang dianggap tidak tergantung. Misalnya tentang dominasi modal asing. Dalam kal ini, Kanada dan Belgia akan lebih tergantung daripada India atau Pakistan. Tetapi sulit sekali memasukkan Kanada dan Belgia ke dalam kelompok Negara-negara yang tergantung, karena tingkat kemakmurannya yang tinggi. Baik dominasi maupun ketergantungan merupakan gejala yang umum yang ada di Negara-negara pusat maupun pinggiran.

Teori liberal pada dasarnya tidak banyak dipengaruhi oleh teori ketergantungan. Teori Liberal tetap berjalan seperti sebelumnya, yakni mengikuti asumsi-asumsi bahwa modal dan investasi adalah masalah utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Teori yang dianut oleh para ahli ekonomi ini lebih

mengembangkan diri pada keterampilan teknisnya, yakni bagaimana membuat table *input-output* yang baik, bagaimana mengukur keterkaitan diantara berbagai sector ekonomi dan sebagainya. Tentu saja bukan tidak berguna. Tetapi, yang kurang dipersoalkan adalah bagaimana faktor politik bisa dimasukkan ke dalam model mereka.

C. Teori Artikulasi

Munculnya teori ini dikarenakan ketidakpuasan terhadap teori ketergantungan karena pada dasarnya pembangunan dan industrialisasi memang terjadi di negara-negara terbelakang. Mula pertama dikembangkan oleh antropolog Perancis, seperti Claude Meillassoux dan Pierre Phillippe Rey. Teori ini melihat persoalan keterbelakangan dalam lingkungan proses produksi, artinya keterbelakangan di negara-negara Dunia Ketiga harus dilihat sebagai kegagalan dari kapitalisme untuk berfungsi secara murni, sebagai akibat dari adanya cara produksi lain di negara-negara tersebut.

Teori Artikulasi bertitik tolak dari konsep Formasi Sosial. Dalam marxisme dikenal konsep cara produksi (*mode of production*), misalnya cara produksi feodal, cara produksi kapitalis, dan cara produksi sosialis, yang ketiganya memiliki perbedaan. Misal dalam kapitalisme terdapat pasar bebas,

akumulasi modal yang cepat dan sebagainya. Namun, kenyataan yang sesungguhnya dalam masyarakat tidak hitam putih seperti itu. Adanya cara peralihan seperti dari cara produksi feodal ke kapitalis bukan terjadi pada hitungan hari, tetapi memakan waktu yang lama dan pada waktu peralihan yang lama inilah terjadi percampuran dari dua atau lebih cara produksi. Oleh karena itu, gejala di mana beberapa cara produksi ada bersama disebut dengan formasi sosial.

Jika teori ketergantungan melihat bahwa kapitalisme yang menggejala di negara-negara pinggiran berlainan dengan kapitalisme yang menggejala di negara-negara pusat, maka teori artikulasi berpendapat bahwa kapitalisme di negara-negara pinggiran tidak dapat berkembang karena artikulasinya, atau kombinasi unsur-unsurnya tidak efisien. Dengan kata lain, kegagalan dari kapitalisme di negara-negara pinggiran bukan karena yang berkembang di sana adalah kapitalisme yang berbeda, tetapi karena koeksistensi cara produksi kapitalisme dengan cara produksi lainnya (kemungkinan) saling menghambat.

Teori Artikulasi bertitik tolak dari konsep formasi sosial. Dalam Marxisme dikenal konsep cara produksi. Masing-masing cara produksi mempunyai ciri yang berlainan dengan cara produksi lainnya. Namun dalam kenyataannya di dalam

masyarakat selalu terdapat lebih dari satu cara produksi secara bersama-sama. Inilah yang disebut formasi sosial, yaitu gejala dimana beberapa cara berproduksi ada bersama.

Dalam Teori Artikulasi kapitalisme di negara-negara pinggiran tidak bisa berkembang karena artikulasinya atau kombinasi unsur-unsurnya tidak efisien. Ada banyak unsur penghambatnya. Bagi Teori Artikulasi kegagalan dari kapitalisme di negara-negara pinggiran bukan karena yang berkembang di sana adalah kapitalisme yang berbeda, tetapi karena koeksistensi cara produksi kapitalisme dengan cara produksi lainnya bersifat saling menghambat.

Teori Artikulasi disebut juga sebagai teori yang memakai pendekatan cara produksi. Pada teori ini, persoalan keterbelakangan dilihat dalam lingkungan proses produksi. Bagi teori artikulasi, keterbelakangan di Negara-negara dunia ketiga harus dilihat sebagai kegagalan dari kapitalisme untuk berfungsi secara murni. Sebagai akibat dari adanya cara produksi lain di negara-negara tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Awanda, Erna. 2007. *Perspektif Teori Modernisasi dan Teori Dependensi*.
- Blakely, E.D., and Ted K. Bradshaw. 2000. *Planning Local Economic Development: Theory and Practice*. Thousand Oaks, CA: Sage.
- Budiman, Arief. 2000, *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Delacroix, Jacques. 1977. "The Export of Raw Materials and Economic Growth: A Cross National Study." *American Sociological Review* 42, 5: 795-808.
- Drucker, Peter F. 1993. *The Post Capitalist Society*. Oxford: Butterworth & Heinemann.
- Moelyarto, T. 1995. *Politik Pembangunan: Sebuah Analisis Konsep, Arah dan Strategi*. Cetakan Ketiga. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Nugroho, Riant. 2000. *Organisasi Publik Masa Depan*. Jakarta: Perpod.
- Poloma, M. Margaret. 2003. *Sosiologi Kontemporer*. (Terj). Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Portes, Alejandro. 1976. "On the Sociology of National Development: Theories and Issues." *American Journal of Sociology* 82: 68-74.
- Soetomo. 1995. *Masalah Sosial dan Pembangunan*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Syamsul, Hadi. 2005. *Strategi Pembangunan, Mahatir & Soeharto*. Jakarta: Japan Foundation.

Tjitropranoto, Prabowo. 2005. *Metoda dan Desain Penelitian Penyuluhan Pembangunan*. Materi Kuliah. Program Studi Ilmu PPN. Bogor: Institut Pertanian Bogor.

Todaro, M.P. 1995. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jakarta: Erlangga.